



SKALA

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia



RENCANA KERJA TAHUNAN PROGRAM SKALA Juli 2024 – Juni 2025

Agustus 2024

Saran Kutipan:

Disiapkan untuk: SKALA
Negara: Indonesia
Tanggal: 30 Agustus 2024

Informasi Kontak

Patrick Compau
Contractor Representative
patrick.compau@dt-global.com
+62 813 2255 7171

Revisi

Rev #	Pembaharuan	Tanggal	Ditinjau	Disetujui

SKALA – Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Gedung IFC 2, Lantai 17
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23 | Jakarta 12920 | Indonesia

Dokumen ini disusun DT Global sebagai pedoman untuk kepentingan dan digunakan oleh DFAT semata sesuai ketentuan perjanjian SKALA. DT Global tidak dan tidak akan bertanggung jawab atau memiliki kewajiban apa pun yang timbul kepada DFAT atau pihak ketiga mana pun dari penggunaan atau kepercayaan pihak mana pun terhadap isi dokumen ini.

Publikasi ini didanai Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan yang dikemukakan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis sendiri dan belum tentu merupakan pandangan Pemerintah Australia.

SKALA didukung oleh Pemerintah Australia dan dikelola oleh DT Global.

Daftar Isi

Akronim dan Singkatan	4
Ringkasan Eksekutif	5
Pendahuluan	9
Konteks.....	9
Pendekatan Program.....	10
Rencana Kerja Tahunan 2024 - 2025.....	13
Pendekatan terhadap Perencanaan Kerja.....	13
Kerangka Rencana Kerja.....	13
Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Area Fokus Program.....	14
1. Data dan Analisis	14
2. Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)	14
3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)	15
4. Manajemen Keuangan Publik (PFM).....	15
Koordinasi Lintas Program	17
Manajemen dan Tata Kelola	18
Anggaran Program 2024-2025	18
Tata Kelola Program	19
Kepegawaian dan Operasi.....	21
Pemantauan, Evaluasi, Penelitian dan Pembelajaran	21
Manajemen Pengetahuan, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan.....	22
Manajemen Risiko.....	23
Lampiran 1. Rancangan Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025.....	25
Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025 EOPO 1	25
Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025 EOPO 2	42
Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025 EOPO 3	54
Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025 Cross-EOPO Support.....	58

Akronim dan Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AWP	<i>Annual Work Plan</i> (Rencana Kerja Tahunan)
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
CHT	Cukai Hasil Tembakau
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DFAT	<i>Department of Foreign Affairs and Trade</i> (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan)
EOPD	<i>End of Program Outcome</i> (Capaian Akhir Program)
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial)
GoA	<i>Government of Australia</i> (Pemerintah Australia)
Gol	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)
IO	<i>Intermediate Outcome</i> (Capaian Menengah)
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
MERL	<i>Monitoring, Evaluation, Research and Learning</i> (Pemantauan, Evaluasi, Penelitian dan Pembelajaran)
MKP	Manajemen Keuangan Publik
OTSUS	Otonomi Khusus
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
REGSOSEK	Registrasi Sosial Ekonomi
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SC	<i>Steering Committee</i> (Komite Pengarah)
SDPDN	Satu Data Pemerintah Daerah Nasional
SEPAKAT	Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu
SIPD-RI	Sistem Informasi Pembangunan Daerah - Republik Indonesia
SKALA	Sinergi dan Kolaborasi untuk Layanan Dasar
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TAP	<i>Thematic Action Plan</i> (Rencana Aksi Tematik)
TC	<i>Technical Committee</i> (Komite Teknis)
UU HKPD	Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Ringkasan Eksekutif

SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia yang dikembangkan bersama untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata di beberapa daerah yang lebih tertinggal. Program ini berfokus pada penguatan kondisi pemampu dan memfasilitasi kemitraan lintas sektoral untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar dalam kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks dan terdesentralisasi. Program ini berupaya mengatasi kesenjangan dalam penyediaan layanan dasar, mendorong kesetaraan gender, serta pelibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap pengelolaan keuangan publik yang lebih kuat di daerah tertinggal di Indonesia sehingga alokasi sumber daya fiskal dapat lebih merata dan berkelanjutan serta didukung oleh kualitas data dan sistem yang lebih baik guna mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, Program SKALA juga menghadapi berbagai kemungkinan perubahan situasi pada kondisi pergantian kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah, yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Keseluruhan rancangan dan implementasi Program SKALA berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program SKALA mendorong penguatan fungsi-fungsi utama tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga proses administrasi. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam penyediaan layanan dasar, sehingga pelaksanaannya tidak terlepas dari fungsi tersebut. Upaya yang dilakukan Program SKALA berpedoman pada tiga Capaian Akhir Program (*End of Program Outcomes*, EOPO): (1) kondisi pemampu yang lebih kuat bagi penyediaan layanan dasar di daerah, (2) penyediaan layanan dasar di daerah yang lebih baik, dan (3) partisipasi, representasi dan pengaruh yang lebih kuat dari kelompok rentan dalam pengambilan keputusan. EOPO ini didukung oleh sembilan Capaian Antara yang berfokus pada penguatan kebijakan, mendorong perencanaan berbasis bukti, menerapkan analisis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), memfasilitasi koordinasi antar kementerian/lembaga, serta meningkatkan akuntabilitas dan sistem data. Program ini bertujuan untuk menciptakan perbaikan sistemik yang berkelanjutan dalam penyediaan layanan dasar, guna mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan sosial di Indonesia.

Struktur tata kelola program memberikan panduan yang terpadu mengenai strategi, kinerja, dan manajemen risiko. Hal ini juga memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan prioritas pemerintah pusat dan daerah. Program SKALA dikelola dan dipimpin oleh Komite Pengarah dan Komite Teknis nasional, yang diketuai bersama oleh DFAT dan Bappenas. Komite Teknis terdiri dari tiga kelompok kerja teknis, masing-masing diketuai bersama oleh DFAT dan Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas. Sebanyak 25 direktorat yang mewakili kementerian/lembaga mitra tergabung dalam kelompok kerja. Tujuh Komite Program Provinsi mewakili mitra pemerintah provinsi yang berpartisipasi dalam seluruh kelompok kerja teknis Program SKALA.

Tata kelola dan proses penyusunan rencana kerja Program SKALA bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi lintas kementerian dan koordinasi di berbagai tingkatan. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan agenda perencanaan dan penganggaran yang inklusif di tiga K/L Pengampu yang telah diberi mandat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Program SKALA telah mencapai pemahaman bersama mengenai peran, tanggung jawab, dan intervensi yang diperlukan, yang menjadi landasan bagi rencana kerja Program SKALA yang komprehensif. Hal ini dicapai melalui proses negosiasi dan koordinasi yang ekstensif untuk memastikan keselarasan dengan prioritas pemerintah. Dengan menyelaraskan rencana kerja Program SKALA dengan rencana kerja K/L dan pemerintah daerah mitra, program ini memastikan

adanya kepemilikan, akuntabilitas, dan keberlanjutan dampak. Rencana kerja multitalahun Program SKALA disusun sebagai bagian dari siklus perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pemerintah, sehingga menjadikannya bagian yang integral dari proses pemerintahan yang sedang berlangsung.

Rencana Kerja Tahunan Program SKALA 2024-2025 dikembangkan berdasarkan pada kerangka logika program dan prioritas pemerintah untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar. Kegiatan program untuk periode ini disusun dalam empat area tematik: Data dan Analisis, Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, Standar Pelayanan Minimal, dan Manajemen Keuangan Publik. Untuk memetakan keterkaitan antara area tematik dan momentum pelaksanaan setiap kegiatan dalam rencana kerja, SKALA telah mengembangkan 12 Rencana Aksi Tematik (*Thematic Action Plan, TAP*) multitalahun. Dokumen TAP merinci peran dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah mitra, termasuk waktu pelaksanaannya, hingga berakhirnya fase pertama Program SKALA pada tahun 2026.

TAP menyajikan kerangka kerja operasional untuk memandu pelaksanaan program. TAP berfokus pada perubahan sistemis yang diperlukan untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar oleh pemerintah daerah.

Program SKALA berupaya menjawab empat pertanyaan berikut:

1. Apakah masyarakat miskin dan rentan di wilayah kerja Program SKALA dapat menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah terkait penyediaan layanan dasar yang mereka butuhkan?
2. Apakah data yang digunakan pemerintah sudah cukup mewakili kondisi dan kebutuhan layanan dasar untuk masyarakat miskin dan rentan?
3. Apakah pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk penyediaan layanan dasar yang inklusif?
4. Apakah kementerian/lembaga telah menyediakan kebijakan dan peraturan yang tepat, termasuk penganggaran, untuk memungkinkan pemerintah daerah menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan?

Rencana kerja Program SKALA yang saat ini memasuki tahun kedua pelaksanaannya (2024-2025), disusun untuk mendukung berbagai elemen yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi Indonesia yang kompleks.

Data dan Analisis. Program SKALA bekerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki mandat untuk mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah, serta meningkatkan tata kelola data dan interoperabilitas di seluruh sektor dan tingkat pemerintahan. Program SKALA memprioritaskan keterlibatan kelompok rentan dengan memperluas dan meningkatkan Sistem Informasi Desa dan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) nasional. Di tingkat daerah, Program SKALA memberikan dukungan teknis kepada pemerintah provinsi untuk memetakan data yang tersedia, mengembangkan rencana kerja pengelolaan data, dan membentuk Forum Satu Data. Program ini juga mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk menggunakan data secara berkelanjutan dengan memberikan dukungan teknis dalam mengatur siklus manajemen data baru yang diperkenalkan oleh kebijakan Satu Data. Melalui upaya ini, program SKALA mendorong kolaborasi di antara kementerian/lembaga terkait dan memastikan ketersediaan data yang akurat dan terpilah mengenai populasi yang rentan. Data ini membantu menginformasikan rencana pembangunan daerah, menyelaraskan belanja daerah dengan standar pelayanan minimal, dan memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara efektif dan mempertahankan peningkatan dalam penyediaan layanan dasar.

Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI). Program SKALA memfasilitasi kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Program ini memberikan dukungan teknis untuk pengembangan dan pelaksanaan rencana aksi nasional dan daerah yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Program SKALA juga mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender dan telah membantu mengembangkan serta menguji model pemetaan anggaran (*budget tagging*) pertama di Indonesia agar perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat terwakili dengan lebih baik dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Program SKALA mendorong pemanfaatan data REGSOSEK untuk membantu pemerintah daerah dalam memahami dan mengatasi masalah GEDSI serta membangun kapasitas mitra provinsi agar alokasi dan penggunaan anggaran daerah dapat memenuhi kebutuhan kelompok rentan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program SKALA memperkuat penyediaan SPM di tingkat daerah melalui pengembangan rencana aksi SPM yang mengintegrasikan masukan dan kolaborasi dari berbagai unit kerja pemerintah. Melalui bantuan teknis, program SKALA bekerja sama dengan provinsi mitra untuk meningkatkan kelengkapan terhadap persyaratan pelaporan SPM sehingga data kinerja SPM menjadi akurat dan tepat waktu. Program ini juga membantu memastikan bahwa rencana aksi SPM terintegrasi ke dalam pembangunan regional jangka panjang dan rencana kerja tahunan. Penyelarasan ini sangat penting untuk mendapatkan anggaran pemerintah dan dukungan politik untuk penyediaan SPM, terutama dalam penyediaan layanan dasar yang memberikan manfaat bagi kelompok rentan.

Manajemen Keuangan Publik (*Public Financial Management/PFM*). Untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah, Program SKALA bekerja sama dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk membina dan meningkatkan kapasitas provinsi mitra dalam mengembangkan regulasi perpajakan dan retribusi yang akan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Program SKALA juga membantu pembentukan dan pengelolaan dana abadi daerah, serta berkontribusi pada pengelolaan transfer fiskal, khususnya Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Provinsi Papua dan Aceh. Program ini berupaya mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berkontribusi pada stabilitas anggaran pembangunan jangka panjang dengan memberdayakan pemerintah daerah melalui penyediaan dukungan, pengetahuan, dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal serta menyelaraskan belanja daerah dengan standar pelayanan minimal.

60% dari anggaran Program SKALA tahun 2024-2025 dialokasikan untuk biaya kegiatan program. Anggaran kegiatan program dialokasikan untuk EOPO 1, 2, 3, dan lintas EOPO sebagai berikut: 49% untuk EOPO 1, 30% untuk EOPO 2, 10% untuk EOPO 3, dan 12% untuk lintas EOPO. Capaian akhir program (EOPO) akan diupayakan melalui kegiatan yang dilaksanakan bersama kementerian mitra SKALA. Alokasi anggaran program untuk kementerian mitra adalah sebagai berikut: 43% untuk Bappenas, 30% untuk Kemendagri, dan 27% untuk Kemenkeu dari total anggaran kegiatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan di provinsi mencapai 34% dari total anggaran rencana kerja tahunan. Saat ini, kantor Program SKALA telah resmi beroperasi di seluruh provinsi mitra, yaitu di Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, dengan jumlah staf yang lengkap baik di tingkat nasional dan provinsi. Per Agustus 2024, program ini memiliki 131 staf penuh waktu, yang terdiri dari 43% perempuan dan 57% laki-laki. Selain itu, sebanyak 3% dari staf Program SKALA merupakan penyandang disabilitas, dan sesuai dengan kebijakan perekrutannya, SKALA sedang berupaya untuk meningkatkan persentase tersebut menjadi 5%.

Pelaksanaan proses pemantauan, evaluasi, penelitian, dan pembelajaran (MERL) Program SKALA mengadopsi pendekatan adaptif berbasis masalah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan

memenuhi kebutuhan informasi baik di kalangan internal maupun eksternal, dengan memanfaatkan metode kualitatif dan kuantitatif. Pelaksanaan MERL bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran program dengan menghasilkan dan membagikan bukti yang mendukung pengambilan keputusan, memenuhi kebutuhan akuntabilitas kepada DFAT, menyelaraskan dengan prioritas pemantauan dan penelitian Pemerintah Indonesia, serta mendukung komunikasi dan advokasi strategis. Proses ini berfokus untuk melihat hubungan antara keluaran dan capaian program, yang dimulai dengan penilaian kemajuan program dalam tata kelola kebijakan dan sistem yang mendukung, kemudian dilanjutkan dengan melihat dampaknya terhadap penyediaan layanan dasar. Selain menjalankan fungsi umum MERL, terdapat tim peneliti yang juga berperan dalam memastikan kualitas pelaksanaan agenda penelitian strategis, baik melalui kolaborasi dengan pemerintah maupun penelitian independen, guna mendukung advokasi dan perbaikan kebijakan. Pelaksanaan MERL Program SKALA mendukung keberhasilan implementasi rencana kerja multitaruhun dengan mendorong praktik reflektif berbasis bukti, memantau perubahan dalam proses pemerintahan, serta mendukung penelitian formatif.

Strategi manajemen pengetahuan, komunikasi dan diplomasi publik, serta advokasi kebijakan Program SKALA dirancang untuk meningkatkan pengaruh para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan pemenuhan kebutuhan informasi serta keterampilan para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menyusun narasi positif yang mewakili suara mereka dan memperkuat narasi ini melalui jaringan strategis untuk memperkuat pengembangan kebijakan. Program SKALA secara sistematis mendokumentasikan prosedur, praktik baik, dan pembelajaran, menciptakan basis pengetahuan yang kuat untuk pembelajaran dan berbagi wawasan yang berkelanjutan. Dengan mempromosikan pengembangan kebijakan berbasis bukti dan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, program ini berperan dalam memperkuat advokasi kebijakan dalam sistem pemerintahan. Selain itu, program ini juga berupaya untuk membangun komunitas yang berpengaruh guna menginformasikan kebijakan dan meningkatkan kapasitas mitra melalui pelatihan terkait manajemen pengetahuan, komunikasi dan diplomasi publik, dan analisis kebijakan.

Program SKALA memiliki pendekatan manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif untuk memastikan stabilitas dalam ruang lingkup yang dinamis. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan program. Saat ini, risiko utama yang dihadapi mencakup transisi politik dari pergantian pemerintahan dan pemilihan umum di tahun 2024, konflik yang masih berlangsung di beberapa provinsi di Papua, serta tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk dalam implementasinya. Program SKALA melakukan mitigasi berbagai risiko ini dengan menyesuaikan pelaksanaan operasional, memantau perkembangan politik secara berkala, berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan utama, dan memprioritaskan langkah-langkah keselamatan dan pencegahan kecurangan, termasuk pelatihan pengamanan wajib bagi semua staf program.

Pendahuluan

Konteks

Program SKALA dikembangkan untuk membantu memahami kompleksitas lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Program ini sangat menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung serta membangun kemitraan lintas sektor. Pendekatan ini bertujuan untuk penyediaan layanan dasar menjangkau seluruh masyarakat dan mengatasi tantangan yang muncul dari sistem desentralisasi di Indonesia.

Konteks Sosial

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman dan memiliki populasi besar yang tersebar di ribuan pulau. Tantangan geografis yang dihadapi menimbulkan kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar dan kesempatan yang tersedia. Masalah ketimpangan masih menjadi konteks sosial utama di wilayah Program SKALA beroperasi, khususnya yang berdampak pada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil, masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketimpangan gender masih menjadi salah satu masalah utama, terutama di daerah pedesaan, di mana perempuan mengalami kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Berbagai indikator, seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kematian ibu, dan rendahnya partisipasi angkatan kerja, mempertajam kesenjangan ini. Sebagai contoh, perempuan di daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Barat memiliki rata-rata periode sekolah terendah dan tingkat buta huruf tertinggi. Selain itu, angka kematian ibu di wilayah-wilayah ini jauh lebih tinggi, dengan beberapa provinsi mencatat angka kematian hingga 489 per 100.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan rata-rata nasional 305 per 100.000¹.

Tatanan sosial menciptakan peluang berharga untuk memperkuat penyediaan layanan dasar melalui praktik tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif. Dengan meningkatkan keterwakilan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan, terdapat potensi besar untuk memutus siklus kemiskinan dan ketimpangan. Program SKALA dikembangkan untuk memanfaatkan peluang ini dengan fokus pada intervensi yang mendorong inklusi sosial serta memberdayakan keterlibatan masyarakat sipil, guna mendorong perubahan positif dan pembangunan berkelanjutan bagi kelompok rentan.

Konteks Politik

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, di mana pemerintah daerah memainkan peran penting dalam penyediaan layanan dasar. Namun, desentralisasi juga menghadirkan tantangan terkait kesinambungan kebijakan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam konteks politik dengan seringnya terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat daerah, yang sering kali menyebabkan pergeseran prioritas dan penundaan dalam implementasi kebijakan.

Pemilihan Presiden Indonesia 2024 yang mengukuhkan Jenderal Purn. Prabowo Subianto sebagai Presiden periode 2024-2029, menjadi momentum pergantian kepemimpinan yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan di masa mendatang. Masa transisi ini mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja antara pemangku kepentingan utama Program SKALA, termasuk Kementerian

¹ BPS https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1349/sdgs_3/1

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai mitra kerja Program SKALA, perubahan prioritas K/L dapat berdampak secara signifikan terhadap implementasi program.

Pemilihan kepala daerah pada bulan November 2024 juga akan menetapkan pemimpin daerah baru di seluruh provinsi mitra Program SKALA. Pemilihan umum dapat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program, terutama di tingkat daerah di mana komitmen dan kapasitas pemimpin daerah merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan. Pergantian kepala daerah berpotensi mempengaruhi perubahan dalam prioritas, fokus administratif, dan tingkat keterlibatan, yang dapat meningkatkan atau menjadi tantangan kemajuan kegiatan program. Apabila para kepala daerah yang baru mendukung dan berkomitmen terhadap reformasi tata kelola, hal ini dapat mempercepat implementasi Program SKALA dan menghasilkan dampak yang lebih signifikan. Sebaliknya, jika kepemimpinan baru memiliki prioritas yang tidak sejalan dengan tujuan SKALA, program ini berpotensi mengalami penundaan atau perlu menyesuaikan strategi untuk menjaga momentum yang ada.

Konteks Ekonomi

Meskipun perekonomian Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, negara ini masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai pertumbuhan yang merata. Kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia masih tinggi, dengan kekayaan dan sumber daya yang terkonsentrasi di pusat-pusat kota seperti Jakarta, sementara provinsi-provinsi di Indonesia Timur masih tertinggal. Pandemi COVID-19 memperparah kesenjangan ini, membebani anggaran pemerintah dan mengurangi kapasitas pemerintah daerah penyediaan layanan dasar.

Program SKALA dirancang untuk mengimplementasikan kegiatan dalam konteks ekonomi tersebut, dengan prioritas pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen keuangan publik di tingkat daerah, khususnya di wilayah yang masih tertinggal. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan dan digunakan secara lebih efektif untuk penyediaan layanan dasar. Hal ini termasuk mendorong keberlanjutan fiskal dan mendukung pemerintah daerah untuk mengeksplorasi berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Program SKALA juga menekankan pentingnya kualitas data dan integrasi sistem untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam alokasi sumber daya dan dalam meningkatkan efisiensi belanja publik.

Pendekatan Program

Program SKALA mendukung pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dengan meningkatkan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal di Indonesia. Tujuan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Indonesia tahun 2020-2024, yang bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih mandiri, maju, adil, dan sejahtera. Hal ini dibentuk berdasarkan pemahaman bahwa kemiskinan dan ketimpangan berakar dari kesenjangan akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Layanan dasar tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dan memungkinkan masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Definisi 'kerentanan' dalam program SKALA mencakup individu atau kelompok yang mengalami hambatan untuk partisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan akibat faktor-faktor seperti lokasi geografi, disabilitas, gender, atau status sosial ekonomi.

Tujuan Program SKALA juga dipengaruhi oleh pembelajaran dari program tata kelola sebelumnya yang merupakan kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia di Indonesia. Berdasarkan pembelajaran ini, Program SKALA secara strategis berfokus pada penguatan fungsi-fungsi tata kelola utamam yaitu

perencanaan, penganggaran, dan administrasi, yang menjadi fondasi para penyedia layanan untuk masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan Program SKALA untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif, dengan menciptakan kondisi pemampu untuk penyediaan layanan, tanpa terlibat langsung dalam penyediaan layanan tersebut. Program ini pada hakikatnya bertujuan untuk memperkuat proses dan sistem Pemerintah Indonesia yang mengatur penyediaan layanan dasar sehingga layanan tersebut dapat menjangkau masyarakat yang paling rentan di daerah yang masih tertinggal di Indonesia. Pendekatan sistemis ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan dasar serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia secara keseluruhan.

Capaian Akhir Program (EOPO) Program SKALA dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan utamanya dengan berfokus pada tiga pilar: kondisi pemampu yang lebih kuat bagi penyediaan layanan dasar di daerah, tata kelola pemerintahan daerah untuk penyediaan layanan dasar, serta partisipasi, representasi dan pengaruh yang lebih kuat dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.

EOPO 1: Kondisi Pemampu yang Lebih Kuat bagi Penyediaan Layanan Dasar Daerah

EOPO pertama bertujuan untuk memastikan bahwa kementerian/lembaga di tingkat pusat mengembangkan dan menerapkan kebijakan, rencana, dan anggaran yang lebih baik untuk memperkuat penyediaan layanan dasar di daerah tertinggal. Capaian ini penting karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi di Indonesia sangat bergantung pada kebijakan dan kerangka kerja pemerintah pusat untuk memandu dan mendukung pemerintah daerah. Fokus SKALA pada perbaikan kebijakan di tingkat pusat dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih koheren dan mendukung bagi pemerintah daerah untuk memberikan layanan secara efektif. Capaian ini juga menjawab kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik di antara kementerian-kementerian di tingkat pusat untuk mencegah fragmentasi kebijakan dan peraturan yang dapat menyebabkan inefisiensi di tingkat daerah.

EOPO 2: Penyediaan Layanan Dasar di Daerah yang Lebih Baik

EOPO kedua menargetkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah mitra Program SKALA² untuk merencanakan, menganggarkan, dan mengelola sumber daya secara lebih efektif. Capaian ini menekankan pentingnya memperkuat pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik, perencanaan, dan pemantauan kinerja. Semua aspek tersebut sangat penting dalam penyediaan layanan dasar yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat rentan.

EOPO 3: Partisipasi, Representasi dan Pengaruh yang Lebih Kuat dari Kelompok Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya

EOPO ketiga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah. Capaian ini berlandaskan pada pemahaman bahwa pemerintahan yang inklusif adalah kunci untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan semua warga negara, terutama mereka yang paling rentan. Dengan memberdayakan kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam perencanaan kebijakan, Program SKALA bertujuan untuk mendorong penyediaan layanan dasar yang lebih merata.

² Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua

Ketiga EOPO ini saling melengkapi, dengan masing-masing mendukung satu sama lain untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dalam meningkatkan penyediaan layanan dasar dan mengurangi ketimpangan. Fokus pada capaian akhir tersebut didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan sistemis dalam kerangka tata kelola pemerintahan dan kebutuhan khusus dari kelompok rentan.

Logika program diimplementasikan melalui sembilan Capaian Antara (*Intermediate Outcomes, IO*).

1. **IO 1: Kementerian/lembaga memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan mengenai Pengelolaan Keuangan Publik dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah.**
2. **IO 2: Kementerian/lembaga menggunakan bukti/data dalam memperkuat perencanaan, koordinasi, dan penentuan prioritas desentralisasi.**
3. **IO 3: Kementerian/lembaga meningkatkan pemanfaatan analisis dan bukti mengenai GEDSI dalam menyiapkan kebijakan, perencanaan, dan anggaran guna memastikan pemenuhan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.**
4. **IO 4: Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran mampu mengelola keuangan publik dengan lebih baik untuk meningkatkan layanan dasar yang sesuai Standar Pelayanan Minimal.**
5. **IO 5: Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran memperkuat pemanfaatan bukti/data mengenai kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan dalam penetapan rencana dan anggaran layanan dasar.**
6. **IO 6: Pejabat kunci di provinsi dan kabupaten sasaran makin memahami, mampu mengukur dan merencanakan penyediaan layanan dasar yang sesuai kebutuhan seluruh warga.**
7. **IO 7: Pemerintah makin kuat dalam melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah.**
8. **IO 8: Perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan/atau perwakilannya makin terlibat dan mempengaruhi proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah.**
9. **IO 9: Sistem informasi di daerah menghasilkan analisis yang lebih akurat tentang kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sehingga memastikan penyediaan layanan dasar yang lebih inklusif.**

Capaian antara ini didukung oleh masukan dan kegiatan khusus, seperti bantuan teknis, pengembangan kapasitas, advokasi kebijakan, dan pengembangan sistem data. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk mengatasi hambatan utama dalam penyediaan layanan dasar yang efektif dan menciptakan kondisi pemampu untuk mencapai EOPO. Dengan menysasar area-area tersebut, Program SKALA bertujuan untuk mendukung perubahan sistemik yang akan meningkatkan penyediaan layanan dasar dan, dalam jangka panjang, mendorong penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Rencana Kerja Tahunan 2024 - 2025

Pendekatan terhadap Rencana Kerja

Tata kelola program dan proses penyusunan rencana kerja Program SKALA dirancang untuk meningkatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga secara berkelanjutan dan meningkatkan koordinasi di berbagai tingkatan dalam berbagai bidang prioritas yang terkait dengan penyediaan layanan dasar yang inklusif. Program SKALA menyusun rencana kerja melalui peran sekretariatnya untuk menghasilkan agenda multi-tahun tentang perencanaan dan penganggaran inklusif di tiga kementerian/lembaga, yang diselaraskan dengan prioritas mitra. Pendekatan Program SKALA juga diwujudkan dalam bentuk kemitraan guna memastikan Pemerintah Indonesia secara bersama-sama melaksanakan komponen utama dari rencana kerja tersebut. Hasilnya adalah terciptanya pemahaman bersama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, kondisi pemampu, dan proses pelaksanaan kegiatan yang sesuai untuk mencapai tujuan pembangunan bersama Pemerintah Indonesia.

Penyusunan agenda. Kesenambungan kebijakan dan kolaborasi yang efektif antara Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas merupakan hal yang penting untuk tercapainya tujuan Program SKALA. Oleh karena itu, diperlukan negosiasi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan secara ekstensif terkait area prioritas yang memerlukan koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk menghasilkan rencana kerja tahunan. Pada bulan Mei-Agustus 2024, Program SKALA memfasilitasi dialog intra-kementerian/lembaga, multilevel, dan antar-kementerian terkait agenda prioritas untuk membangun pemahaman bersama mengenai rencana kerja dan apa yang diperlukan untuk mewujudkannya.

Bekerja dalam sistem kemitraan. Program SKALA juga melaksanakan tata kelola (lihat sub-bagian Tata Kelola Program) dan mekanisme penyusunan rencana kerja untuk memastikan bahwa komitmen meningkatkan kolaborasi dan koordinasi agenda prioritas yang relevan dengan misi dan mandat Program SKALA selaras dengan sistem Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas. Penyelarasan proses tata kelola dengan siklus perencanaan, penganggaran, dan pemantauan evaluasi Pemerintah Indonesia, juga memastikan bahwa rencana kerja Program SKALA merupakan bagian integral dari agenda kegiatan yang sedang berlangsung yang akan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Indonesia di dalam sistem dan prosesnya sendiri.

Kerangka Rencana Kerja

Rencana Kerja Tahunan 2024-2025 didasarkan pada kerangka berfikir Program SKALA (tiga EOPO, sembilan IO)³. Ketiga EOPO tersebut saling terkait. Kebijakan dan praktik di tingkat nasional dapat mendukung atau menjadi tantangan penyediaan layanan dasar di tingkat daerah, sehingga hadirnya Program SKALA bertujuan untuk memastikan kondisi pemampu kebijakan yang kondusif untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar. Di tingkat daerah, penyediaan layanan yang lebih baik dan lebih inklusif memerlukan kemauan dan kemampuan daerah, serta partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Perbaikan dan tantangan di tingkat daerah harus dikomunikasikan kepada pemerintah pusat sehingga tantangan dapat diatasi, kemajuan dapat dipertahankan, dan praktik-praktik baik dapat dibagikan. Analisis permasalahan yang dilakukan Program SKALA dengan pemerintah daerah mengungkap permasalahan yang dikelompokkan ke dalam empat area tematik.

³ Logika program ini, dalam bentuk kerangka capaian, disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam *Subsidiary Arrangement (SA)*. SA merupakan dasar hukum bagi SKALA untuk beroperasi di Indonesia dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kerangka capaian.

Keempat area tematik ini memberikan kerangka menyeluruh untuk semua kegiatan yang didukung Program SKALA, termasuk selama periode Juli 2024 - Juni 2025.

Pertama, ketersediaan dan penggunaan data yang cukup mewakili kondisi di lapangan, termasuk data tentang kelompok rentan untuk penyediaan layanan dasar yang inklusif dan pengambilan keputusan (**Data dan Analisis**).

Kedua, partisipasi, keterwakilan dan pengaruh perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pengambilan keputusan pemerintah (**GEDSI**).

Ketiga, kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan dan menyediakan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif atau kualitas belanja daerah (**Standar Pelayanan Minimal**).

Keempat, ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang memadai oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan dasar yang inklusif atau kapasitas fiskal daerah (**Manajemen Keuangan Publik**).

Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Area Fokus Program

1. Data dan Analisis

Dukungan Program SKALA dalam bidang data dan analisis merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar yang kualitas dan inklusif di seluruh wilayah provinsi mitra. Program SKALA berfokus pada penguatan tata kelola, integrasi, dan pemanfaatan data di tingkat nasional dan daerah untuk mengatasi tantangan yang disebabkan oleh sistem data yang terfragmentasi serta kurangnya data berkualitas dan terpilah.

Inisiatif utama dalam area fokus ini adalah penerapan kebijakan Satu Data Indonesia untuk meningkatkan tata kelola data dan interoperabilitas di seluruh sektor pemerintah. Program SKALA memfasilitasi koordinasi antara Kemendagri, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Permendagri No. 5 Tahun 2024)⁴ dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah. Peraturan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan Satu Data di tingkat daerah dengan memperjelas jalur akuntabilitas dan meningkatkan mekanisme bagi pakai data.

Di tingkat daerah, Program SKALA memberikan dukungan teknis kepada pemerintah provinsi, untuk membantu mereka menavigasi siklus manajemen data baru yang diperkenalkan oleh kebijakan Satu Data. Hal ini mencakup dukungan untuk memetakan data yang ada sesuai standar yang diperlukan, mengembangkan rencana kerja untuk pengelolaan data, dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan berkualitas dan relevan untuk tujuan perencanaan. Program SKALA juga mendukung pembentukan dan penguatan Forum Satu Data di tingkat provinsi, yang sangat penting untuk pengelolaan data pemerintah dan memastikan penggunaannya dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Program SKALA berupaya untuk memperluas dan meningkatkan Sistem Informasi Desa serta membantu memperkuat penggunaan registrasi sosial ekonomi nasional (REGSOSEK) di seluruh wilayah provinsi mitra. Sistem dan basis data ini sangat penting untuk mengumpulkan data terpilah terkait populasi rentan dan untuk meningkatkan akurasi dan inklusivitas rencana pembangunan daerah.

2. Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Komitmen Program SKALA terhadap kesetaraan GEDSI terintegrasi dalam seluruh kegiatan, dengan fokus pada pengarusutamaan prinsip-prinsip ini ke dalam proses perencanaan, penganggaran, dan

⁴ Selain itu, juga merupakan hasil dukungan SKALA kepada Kemendagri dalam Rencana Kerja Tahunan 2023-2024.

penyediaan layanan dasar. Program SKALA telah mengadopsi pendekatan dua jalur, yang menggabungkan inisiatif spesifik GEDSI dengan pengarusutamaan prinsip-prinsip GEDSI pada semua bidang pekerjaan.

Komponen utama dari upaya pengarusutamaan GEDSI Program SKALA adalah dukungan terhadap pengembangan dan pelaksanaan rencana aksi nasional dan daerah bagi penyandang disabilitas dan pengarusutamaan pemetaan anggaran berbasis gender (*gender budget tagging*). Program SKALA memberikan dukungan teknis kepada Bappenas dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi tersebut agar dapat menjawab kebutuhan para penyandang disabilitas dengan lebih baik, serta menyertakan tolok ukur kinerja yang jelas untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai. Program SKALA juga mendorong pengarusutamaan gender melalui kolaborasi dengan Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender dan memfasilitasi penggunaan data REGSOSEK untuk mengatasi isu-isu kesetaraan gender dan inklusi sosial di daerah. Program SKALA mendukung pengembangan dan implementasi model pemetaan anggaran berbasis gender pertama di Indonesia yang mengidentifikasi lebih dari 800 kode belanja daerah. Model ini sedang diuji di beberapa provinsi mitra SKALA.

3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam menghadapi tantangan pemerintah daerah dalam memenuhi SPM, Program SKALA berfokus pada penguatan kerangka kelembagaan dan kapasitas yang diperlukan untuk implementasi SPM yang efektif.

Untuk mendukung hal tersebut, Program SKALA mendorong pembentukan dan penguatan tim pelaksana SPM di tingkat provinsi. Tim ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SPM di berbagai sektor, mengembangkan rencana aksi SPM, dan memonitor pelaksanaan di tingkat kabupaten. Program SKALA juga membantu memastikan bahwa rencana aksi SPM diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja tahunan. Penyelarasan ini sangat penting untuk mendapatkan pendanaan pemerintah dan dukungan politik untuk implementasi SPM. Selain itu, Program SKALA juga berupaya meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan SPM. Dengan memberikan dukungan teknis dalam pengumpulan data dan pelaporan, Program SKALA membantu provinsi mitranya untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap persyaratan pelaporan, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan tepat waktu mengenai kinerja SPM.

4. Manajemen Keuangan Publik (PFM)

Program SKALA berupaya meningkatkan kapasitas fiskal provinsi mitra agar mereka memiliki sumber daya dan sistem yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan dasar yang berkualitas. Upaya ini mencakup peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan transfer fiskal secara lebih efektif, serta dukungan pembentukan dana abadi daerah.

Sebagai contoh, Program SKALA mendukung implementasi Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mencakup ketentuan untuk meningkatkan kewenangan pemungutan pajak daerah. Program SKALA bekerja sama dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk memberikan panduan kepada provinsi-provinsi mitra dalam mengembangkan peraturan daerah yang diperlukan untuk perpajakan dan retribusi daerah. Selain peningkatan pendapatan daerah, Program SKALA juga mendukung pembentukan dana abadi daerah, khususnya di Provinsi Aceh dan Papua Barat. Dana ini dimaksudkan untuk memberikan stabilitas keuangan jangka panjang bagi prioritas pembangunan daerah. Program SKALA memberikan dukungan teknis untuk memperjelas proses yang diperlukan untuk menetapkan dan mengelola dana tersebut

serta membantu memastikan bahwa dana tersebut sesuai dengan peraturan baru dan secara efektif berkontribusi pada kapasitas fiskal daerah. Program SKALA juga mendukung peningkatan pengelolaan transfer fiskal, khususnya yang berkaitan dengan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Tanah Papua dan Provinsi Aceh.

Keempat area tematik yang telah dijelaskan saling terkait satu sama lain. Data memiliki peran penting dalam memahami kebutuhan kelompok rentan. Melalui data yang berkualitas, kita dapat mengukur keberhasilan serta mengidentifikasi kesenjangan dalam partisipasi dan keterwakilan kelompok rentan dalam proses pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas untuk penyediaan layanan dasar yang inklusif yang tidak hanya memenuhi namun juga melampaui SPM. Penyediaan layanan dasar yang inklusif juga membutuhkan sumber daya keuangan yang memadai. Program SKALA telah mengembangkan 12 Rencana Aksi Tematik (TAP) multitanah guna memetakan keterkaitan dan momentum yang tepat untuk setiap kegiatan. TAP ini mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam mengkonsolidasikan langkah yang perlu diambil serta jadwal pelaksanaannya (sampai tahun 2026 yang menandai berakhirnya fase pertama SKALA). Tujuan TAP ini adalah untuk membantu para pemangku kepentingan memahami dan meningkatkan sinergi dan kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai penyediaan layanan dasar yang inklusif.

TAP Program SKALA berfungsi sebagai kerangka kerja operasional untuk memandu pelaksanaan program. TAP berfokus pada perubahan sistemis yang diperlukan untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar oleh pemerintah daerah. Masing-masing dari 12 TAP selaras dengan salah satu dari empat area tematik. TAP disusun untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan pelaksanaan di tingkat daerah dengan memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran didasarkan pada bukti dan bersifat partisipatif, serta diarahkan untuk mencapai SPM. TAP menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian/lembaga dan kolaborasi antar tingkat pemerintahan serta membantu Program SKALA memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah menggunakan sumber daya mereka secara efektif.

Gambar 1. 12 Rencana Aksi Tematik

	TAP #	Area Tematik
GEDSI	1	Memperkuat partisipasi, keterwakilan, dan pengaruh perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
	2	Kebijakan dan Pelembagaan Kebijakan Satu Data Daerah
Data dan Analisis	3	Sistem Informasi Desa
	4	Sistem dan integrasi manajemen data
	5	Analisis dan penggunaan data
SPM	6	Mengelola penerapan standar pelayanan minimal
	7	Perencanaan daerah
	8	Penganggaran daerah
PFM	9	Dana Otonomi Khusus
	10	Pendapatan daerah
	11	Dana abadi daerah
	12	Transfer fiskal

Kerangka kerja operasional ini memberikan hubungan dan tatanan antara 291 keluaran dalam Rencana Kerja Tahunan 2024-25, memetakan kontribusinya terhadap empat area tematik, sembilan capaian antara dan tiga capaian akhir program.

Keluaran dalam Rencana Kerja Tahunan mencakup jenis-jenis kegiatan berikut ini:

1. **Data, Analisis, Penelitian dan Penggunaan:** Memperkuat sistem manajemen data, integrasi data, analisis data, dan penggunaan data untuk mendukung penyediaan layanan yang inklusif. TAP dalam kategori ini melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Satu Data Daerah, Sistem Informasi Desa, sistem manajemen data terpadu, serta alat analisis data.
2. **Pengembangan Kapasitas atau Keterampilan:** Kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pejabat pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
3. **Pengembangan Kebijakan:** Masukan untuk mengembangkan dan melembagakan kebijakan, peraturan, dan pedoman untuk meningkatkan tata kelola dan pemberian layanan di tingkat nasional dan daerah.
4. **Dukungan untuk Perencanaan dan Implementasi:** Bantuan dan panduan untuk perencanaan dan pelaksanaan berbagai inisiatif tata kelola dan pemberian layanan. Hal ini mencakup koordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan (*korbinwas*).
5. **Partisipasi dan Advokasi:** Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi, keterwakilan, dan pengaruh perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui dukungan terhadap jaringan masyarakat sipil.

Setiap TAP juga digunakan dalam lokakarya perencanaan di tingkat provinsi. Hal ini memberikan kejelasan mengenai prioritas dan agenda kepada perwakilan pemerintah daerah, yang kemudian dapat memilih komponen dalam setiap TAP yang paling relevan dengan kebutuhan dan persyaratan mereka, serta mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan konteks daerah. Hal ini memastikan adanya kesinambungan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah.

Rencana Kerja Tahunan 2024-2025 merupakan upaya intensif yang mencakup 291 keluaran. Seperti pada Rencana Kerja Tahunan sebelumnya, mitra program SKALA mengharapkan agar sejumlah kegiatan atau keluaran dapat dilanjutkan ke Rencana Kerja tahun berikutnya. Program SKALA juga akan meninjau kemajuan Rencana Kerja Tahunan ini pada pertengahan tahun serta melakukan menyesuainya sejalan dengan kemungkinan munculnya perubahan yang dibutuhkan sehubungan dengan prioritas kabinet pemerintahan yang baru.

Koordinasi Lintas Program

Rencana Kerja Tahunan 2024-2025 mencakup berbagai kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas program, serta melanjutkan inisiatif yang telah dimulai oleh Program AIPJ, INKLUSI dan INOVASI. Sejumlah kolaborasi juga akan dieksplorasi seiring dengan dimulainya program-program sektoral yang baru. Salah satu fungsi pendukung utama Program SKALA adalah memfasilitasi akses ke pejabat pemerintah daerah di luar mitra sektoral program lainnya. Selain itu, kolaborasi lainnya akan fokus pada pengembangan rencana aksi nasional dan daerah (misalnya untuk penyandang disabilitas) dan kerangka kerja terkait GEDSI.

Program SKALA juga melihat adanya potensi untuk berkolaborasi dalam area yang menjadi fokus bersama, seperti penelitian dan analisis dampak perubahan iklim. Hal ini akan memerlukan eksplorasi lebih lanjut di periode mendatang.

Manajemen dan Tata Kelola

Anggaran Program 2024-2025

Tabel 1. Anggaran Program berdasarkan EOPO dan Kementerian

	Bappenas (%)	Kemendagri (%)	Kemenkeu (%)	Total
EOPO1*	30	31	39	100
EOPO2*	26	47	27	100
EOPO3*	100			100
Lintas EOPO*	93	6	1	100
Total†	43	30	27	100

* Dalam persentase total anggaran EOPO. † Dalam persentase dari biaya kegiatan program.

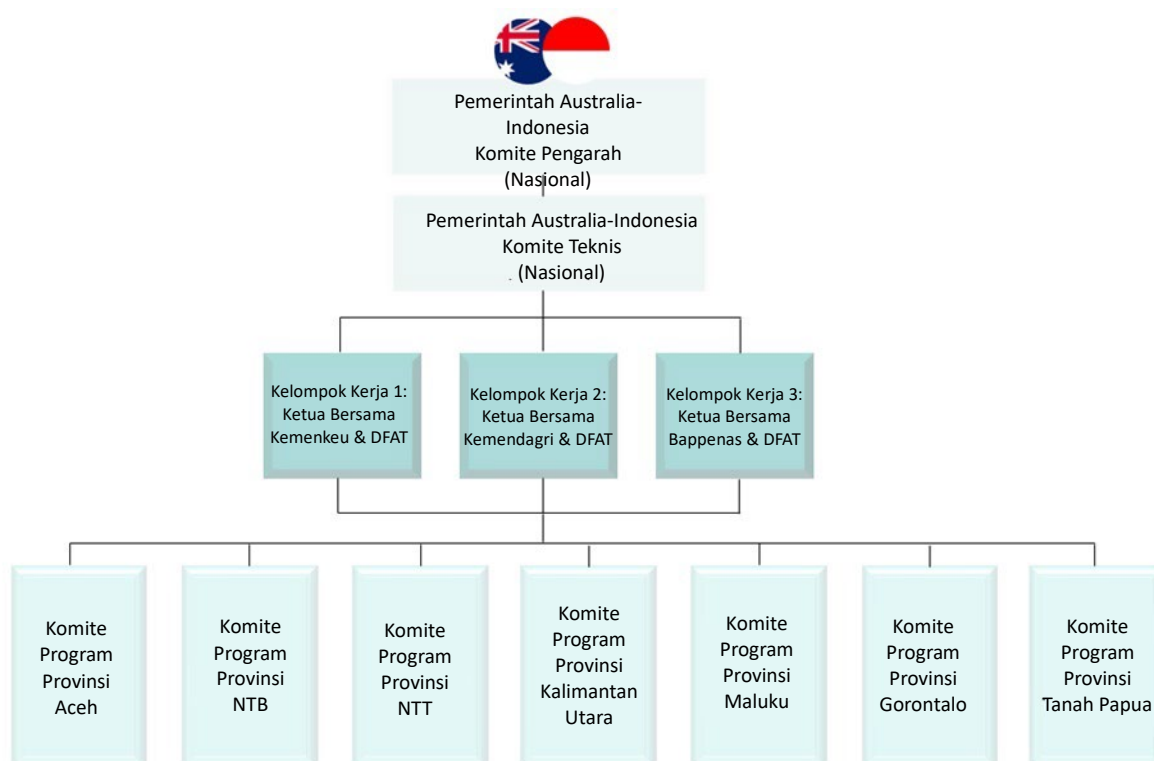
Tabel 2. Anggaran Program berdasarkan Provinsi*

Provinsi	% of provincial budget
Aceh	7%
NTB	8%
NTT	10%
Kaltara	9%
Gorontalo	10%
Maluku	11%
Tanah Papua**	45%
Total	100%

* Anggaran Provinsi merupakan 34% dari total Anggaran Rencana Kerja Tahunan: 33% untuk EOPO dan 1% untuk Lintas EOPO. ** Termasuk Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.

Tata Kelola Program

Struktur tata kelola Program SKALA memberikan panduan terpadu mengenai strategi, kinerja, dan manajemen risiko, serta memastikan bahwa kegiatan Program SKALA selaras dengan prioritas pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong pembelajaran aktif dan pertukaran pengetahuan di antara para pemangku kepentingan.



Gambar 2. Struktur Tata Kelola Program

Komite Pengarah Program (PSC) adalah mekanisme tata kelola Program SKALA tertinggi dengan tanggung jawab utama untuk menetapkan dan mengawasi arah strategis, kinerja, dan manajemen risiko Program SKALA secara menyeluruh. Komite Pengarah diketuai bersama oleh DFAT dan Bappenas. Komite Pengarah juga memiliki wewenang untuk menyetujui Rencana Kerja Tahunan. Pada pertemuan Komite Pengarah yang diadakan pada 7 Agustus 2024, Komite Pengarah menyetujui Rencana Kerja Tahunan Program SKALA untuk periode Juli 2024 - Juni 2025. Komite mencatat pentingnya fleksibilitas yang berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna memastikan keselarasan dengan prioritas Pemerintah Indonesia, termasuk penyesuaian terhadap Rencana Kerja Tahunan untuk dana otonomi khusus. Selain itu, komite sepakat mengenai perlunya integrasi data guna menghindari biaya yang tidak perlu, serta menekankan pentingnya penguatan inovasi dan peran Kemendagri dan Kemenkeu dalam mendukung kegiatan di daerah.

Komite Teknis Program SKALA, yang juga diketuai bersama oleh DFAT dan Bappenas, melapor kepada Komite Pengarah. Komite ini bertanggung jawab untuk: (i) mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Program SKALA, (ii) memastikan keselarasan Program SKALA dengan program pemerintah pusat dan daerah, (iii) meninjau dan memberikan masukan terhadap dokumen strategis Program SKALA, (iv) mendorong pembelajaran dan berbagi pengetahuan di antara para pemangku kepentingan berdasarkan temuan implementasi, (v) menyiapkan laporan kemajuan, dan (vi) mengkomunikasikan capaian Program SKALA. Komite Teknis terdiri dari tiga kelompok kerja teknis, yang masing-masing

diketahui bersama oleh DFAT dan Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas. Seluruh 25 direktorat kementerian/lembaga tersebut merupakan mitra program yang mewakili dalam kelompok kerja (lihat Tabel 3). Pada pertemuan tanggal 7 Agustus 2024, Komite Teknis menyetujui Rencana Kerja Tahunan 2024-25. Komite ini mengamanatkan agar capaian Program SKALA digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan pengetahuan di seluruh kementerian dan provinsi mitranya serta mengakui pentingnya implementasi program yang fleksibel, terutama dalam menghadapi transisi pemerintahan dan perubahan prioritas.

Selain itu, mitra pemerintah provinsi diwakili oleh tujuh Komite Program Provinsi, yang berpartisipasi dalam semua kelompok kerja teknis Program SKALA. Komite Program Provinsi bertanggung jawab untuk: (i) memfasilitasi, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan Program SKALA di tingkat provinsi/kabupaten/kota; (ii) melakukan harmonisasi dan koordinasi antar dinas/lembaga di daerah terkait pelaksanaan Program SKALA di daerah; (iii) memastikan komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Program SKALA di daerah; Pedoman Tata Laksana Program SKALA; (iv) memastikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan ruang kantor untuk Sekretariat Program SKALA Daerah dalam melaksanakan Program SKALA di daerah; (v) menyusun dan mengajukan usulan rencana kerja tahunan Program SKALA Daerah yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah kepada Komite Teknis Program untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan Komite Pengarah Program; (vi) Melaksanakan pertemuan dengan Jejaring Kemitraan Provinsi untuk mendapatkan masukan terhadap pelaksanaan program serta mendorong peran Jejaring Kemitraan Provinsi untuk mendukung perluasan dan keberlanjutan hasil-hasil dan praktik baik program; (vii) melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan rencana kerja tahunan Program SKALA Daerah yang telah disetujui; (viii) melakukan pemantauan dan analisis temuan-temuan pelaksanaan Program SKALA dan melakukan evaluasi teknis dan mendorong pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antar para pemangku kepentingan utama; (ix) mempersiapkan laporan pelaksanaan, materi, dokumen dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Program SKALA yang akan diajukan kepada Komite Teknis Program; (x) mengkomunikasikan kemajuan yang dicapai dan tantangan yang dihadapi kepada Komite Teknis Program dan pihak-pihak lain yang terkait dengan strategi dan pelaksanaan Program SKALA; (xi) menjadi mekanisme utama untuk memfasilitasi kolaborasi horizontal (antar kabupaten/kota) dan kolaborasi (antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan nasional).

Tabel 3. Direktorat Mitra

Kementerian Keuangan
1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
4. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
5. Direktorat Dana Transfer Umum
6. Direktorat Dana Transfer Khusus
7. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan
Kementerian Dalam Negeri
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
2. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
3. Direktorat Pendapatan Daerah
4. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
5. Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah
6. Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD
7. Pusat Data dan Sistem Informasi
8. Pusat Fasilitasi Kerjasama
9. Inspektur Wilayah II
10. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)

Bappenas	
1.	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.	Direktorat Pembangunan Daerah
3.	Direktorat Regional I
4.	Direktorat Regional II
5.	Direktorat Regional III
6.	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda & Olahraga
7.	Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
8.	Direktorat Ketenagakerjaan

Kepegawaian dan Operasional

Kantor Program SKALA telah resmi beroperasi penuh di seluruh wilayah provinsi mitra. Hampir seluruh kantor Program SKALA berlokasi di fasilitas ruangan/gedung yang dialokasikan oleh pemerintah. Hal ini yang menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk berkolaborasi dengan Program SKALA. Namun, di Provinsi Kalimantan Utara dan Tanah Papua, Program SKALA mendirikan kantor di luar fasilitas pemerintah karena menyesuaikan kondisi setempat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini menggunakan fasilitas kabupaten sambil menunggu selesainya pembangunan kantor provinsi, dan kantor SKALA di Provinsi Papua mencakup empat provinsi di wilayah tersebut, sehingga memerlukan fasilitas terpisah.

Staf Program SKALA telah direkrut secara lengkap di tingkat nasional dan provinsi. Upaya perekrutan sangatlah penting untuk memastikan bahwa Program SKALA dapat mencapai hasil, terutama di provinsi-provinsi di mana program ini relatif baru dan mengingat adanya kemungkinan kepemimpinan baru setelah pemilihan kepala daerah pada November 2024. Program SKALA telah secara strategis berkolaborasi dengan mitra kementerian/lembaga untuk memfasilitasi perubahan prioritas daerah guna mendapatkan dukungan untuk melanjutkan rencana kerja provinsi. Tabel 4 menunjukkan profil kepegawaian Program SKALA per 28 Agustus 2024.

Tabel 4. Profil Kepegawaian Program SKALA

Lokasi	Laki-Laki	Perempuan	Kosong	Sub-total
Jakarta	35	34	4	73
Daerah	40	22	0	62
Total	75	56	4	135

SKALA memiliki 3 staf internasional yang merupakan 2,23% dari total stafnya.

Staf Program SKALA memiliki latar belakang yang beragam, mencerminkan komitmen kuat program ini terhadap inklusivitas, khususnya dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Saat ini, terdapat 3% dari staf Program SKALA yang merupakan penyandang disabilitas, dan sesuai dengan kebijakan rekrutmen, SKALA berupaya untuk meningkatkan jumlah tersebut menjadi 5%. Kebijakan kepegawaian ini sejalan dengan tujuan SKALA yang lebih luas untuk mengarusutamakan GEDSI di semua operasinya. Penekanan pada penciptaan tempat kerja yang inklusif merupakan bagian dari strategi yang memastikan bahwa operasional internal program ini konsisten dengan tujuan eksternalnya, serta mendorong terciptanya lingkungan yang menjadikan inklusivitas sebagai nilai dan praktik nyata.

Pemantauan, Evaluasi, Penelitian dan Pembelajaran

Pemantauan, Evaluasi, Penelitian dan Pembelajaran (MERL) Program SKALA mengadopsi pendekatan berbasis pertanyaan terhadap pemantauan, evaluasi dan pembelajaran program – dengan tujuan memahami kebutuhan informasi baik di kalangan internal maupun eksternal, dengan memanfaatkan metode kualitatif dan kuantitatif yang tepat. Sistem MERL juga dirancang untuk bisa adaptif, dengan

memahami kebutuhan untuk merespons pendekatan program yang terus berkembang dalam konteks kebijakan Indonesia yang dinamis.

Pendekatan MERL Program SKALA bertujuan untuk:

- memfasilitasi pembelajaran program melalui pengembangan dan berbagi bukti, serta analisis untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan arah program,
- memenuhi kebutuhan akuntabilitas DFAT, termasuk untuk mengetahui dan mengukur kemajuan terhadap hasil-hasil yang dicapai,
- menyelaraskan dan mendukung kebutuhan serta prioritas MERL Pemerintah, dan
- menghasilkan bukti yang dapat mendukung komunikasi dan advokasi strategis.

Informasi yang dihasilkan dari proses MERL Program SKALA akan digunakan untuk menjelaskan dan mengkontekstualisasikan kemajuan menuju EOPO dan capaian menengah (IO) sebagai hasil dari kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan. Proses ini juga akan menilai kinerja program Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI). MERL mendukung tim pelaksana untuk merefleksikan dan menilai kualitas, nilai tambah, dan kecukupan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan untuk mendorong hasil yang diharapkan melalui capaian hasil yang disepakati bersama. Fokus metodologis MERL adalah memantau hubungan yang diharapkan antara keluaran dengan hasil program. Pada tahap awal, pemantauan difokuskan pada kemajuan menuju IO terkait pengaturan kebijakan, sistem dan kapasitas yang mendukung peningkatan penargetan dan alokasi anggaran untuk penyediaan layanan dasar. Sejauh mana proses ini menghasilkan perubahan nyata dan peningkatan layanan akan menjadi fokus MERL di Fase 2.

Fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tradisional dari tim MERL Program SKALA dilengkapi dengan fungsi penelitian strategis di SKALA. Program SKALA berupaya menggunakan penelitian untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam antar tingkat pemerintahan dan mendukung advokasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik yang mendukung seluruh kelompok masyarakat.

Tim peneliti Program SKALA akan menjalankan tiga fungsi utama sebagai berikut:

- Memastikan kualitas internal pada berbagai kegiatan penelitian sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan;
- Bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan agenda penelitian strategis;
- Melakukan penelitian independen yang berkontribusi pada isu-isu utama yang mendasari program dan mendukung advokasi publik yang diperlukan dan relevan.

Program SKALA telah mengembangkan sistem MERL yang berfokus pada pembelajaran komprehensif yang akan mendukung pelaksanaan rencana kerja multi-tahun. Hal tersebut dilaksanakan dengan mendukung praktik reflektif berbasis bukti, mengumpulkan data kualitatif yang sistematis dan memantau perubahan dalam proses-proses utama pemerintah, serta mendukung penelitian formatif.

Manajemen Pengetahuan, Komunikasi, dan Advokasi Kebijakan

Pendekatan manajemen pengetahuan, komunikasi, dan advokasi kebijakan Program SKALA dirancang untuk memperkuat pengaruh para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pendekatan ini berfokus pada pelibatan audiens utama di Indonesia dan Australia guna memastikan

tercapainya tujuan SKALA. Terdapat tiga elemen kunci dalam pendekatan ini: mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan informasi dan keterampilan para penerima manfaat dan pemangku kepentingan Program SKALA, menyusun narasi yang konstruktif dan positif untuk mencerminkan keterlibatan para pemangku kepentingan, serta memperkuat narasi tersebut melalui jaringan dan kemitraan strategis guna memberikan kontribusi positif pada pengembangan dan implementasi kebijakan.

Komitmen terhadap manajemen pengetahuan yang berkelanjutan dan efektif merupakan inti dari strategi pendekatan tersebut. Pelaksanaan pendekatan ini mencakup pendokumentasian prosedur, praktik baik, dan pembelajaran dari kegiatan Program SKALA secara sistematis. Hal ini bertujuan agar pengetahuan tersebut dapat diakses dan digunakan oleh mitra di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan pengetahuan dari program desentralisasi sebelumnya dan pembelajaran dari kegiatan provinsi yang mitra, program SKALA dapat menciptakan basis pengetahuan yang kuat untuk pembelajaran yang berkelanjutan dan berbagi wawasan di berbagai tingkat pemerintahan. Program SKALA juga mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti dengan menyusun naskah kebijakan, mendorong penggunaan data dalam rekomendasi kebijakan, dan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk menggunakan ringkasan kebijakan sebagai instrumen advokasi dalam sistem pemerintahan. Program SKALA juga berupaya menyusun naskah kebijakan berbasis bukti berdasarkan masukan dari regulasi dan temuan penelitian, memfasilitasi forum kebijakan antara lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta membangun komunitas berpengaruh yang mencakup para aktor perubahan kebijakan melalui dalam maupun luar pemerintahan, seperti universitas, LSM, lembaga penelitian (*think-thank*), dan organisasi masyarakat sipil. Komunikasi strategis Program SKALA berfokus pada pembuatan dan penyebaran materi dan konten berkualitas yang menampilkan capaian program melalui pelibatan media dan berbagai kegiatan diplomasi publik. Program SKALA juga memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mitra dalam manajemen pengetahuan, komunikasi, dan analisis kebijakan sehingga para pemangku kepentingan lebih mampu untuk mengadvokasi perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih inklusif.

Manajemen Risiko

Pendekatan Program SKALA terhadap manajemen risiko bersifat komprehensif, adaptif, dan terintegrasi ke dalam struktur program secara keseluruhan, sehingga memastikan stabilitas program di tengah kondisi yang dinamis dan kompleks. Manajemen risiko disusun berdasarkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi berbagai risiko utama yang berpotensi menjadi tantangan dalam pencapaian EOPO. Proses ini selaras dengan Pedoman Operasional Program SKALA, yang melaksanakan pendekatan terstruktur untuk memantau, melaporkan, dan menangani risiko yang muncul.

Risiko 1. Transisi Pemerintahan dan Pemilihan Kepala Daerah

Risiko utama yang diidentifikasi oleh Program SKALA adalah transisi pemerintahan Indonesia pada bulan Oktober 2024 dan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada bulan November 2024. Periode transisi ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi perubahan terhadap prioritas pemerintah di masa mendatang, yang dapat menyebabkan penundaan implementasi program di tingkat daerah dan potensi hilangnya momentum. Selain itu, terdapat risiko ketidakselarasan antara prioritas pemerintah baru dengan prioritas Program SKALA, serta kemungkinan adanya persepsi yang keliru bahwa Program SKALA tidak netral dalam pelaksanaannya

Untuk memitigasi berbagai risiko tersebut, Program SKALA secara strategis telah memutuskan untuk membatasi pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi sambil menunggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga dapat mempertahankan kontrol yang lebih ketat atas kegiatan program. Selain itu, Program SKALA juga secara aktif mengidentifikasi agenda yang muncul dari pemerintahan yang akan

datang dan bersiap untuk menyesuaikan narasi dan strateginya agar selaras dengan prioritas pemerintah baru tersebut.

Risiko 2. Konflik di Tanah Papua

Konflik yang sedang berlangsung di Tanah Papua menimbulkan risiko yang signifikan terhadap keselamatan dan keamanan tim Program SKALA. Konflik yang baru atau meluas dapat menyebabkan kerusuhan masyarakat sipil, menimbulkan lingkungan yang tidak aman bagi staf dan mengancam pelaksanaan program secara keseluruhan di wilayah-wilayah ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, Program SKALA telah mengambil pendekatan secara seksama dengan tidak beroperasi di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta fokus pada empat provinsi lainnya di Tanah Papua dengan kondisi lebih stabil. Program SKALA juga bekerja sama dengan DFAT untuk memastikan bahwa insiden keselamatan diatasi sesuai dengan pedoman keselamatan DFAT. Seluruh kegiatan Program SKALA di Tanah Papua sepenuhnya didukung oleh Kementerian/lembaga terkait dan Komite Pengarah sebelum dimulai, guna memastikan legitimasi dan dukungan daerah setempat.

Risiko 3. Kebijakan dan Peraturan yang Tumpang Tindih atau Tidak Berkesinambungan

Risiko yang kerap dihadapi Program SKALA adalah adanya kebijakan dan peraturan yang tumpang tindih atau tidak berkesinambungan di tingkat pusat yang dapat menimbulkan tantangan dalam implementasinya di pemerintah daerah dan memperlambat proses reformasi. Ketidakkonsistenan ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Program SKALA dan menyebabkan pemborosan sumber daya.

Untuk mengatasi risiko ini, Program SKALA memfasilitasi diskusi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kerja sama dan transparansi. Program SKALA memanfaatkan jaringan kepemimpinan seniornya untuk menjembatani hubungan antar kementerian dan bekerja sesuai dengan TAP yang didukung oleh para mitra guna mendorong prioritas dan keluaran yang saling terkait di tiga kementerian pengampu. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk menyederhanakan kerangka kebijakan dan peraturan, mengurangi potensi kebingungan, dan inefisiensi.

Perlindungan dan Pencegahan Kecurangan

Selain mengelola berbagai risiko implementasi program, SKALA juga menekankan upaya perlindungan dan pencegahan kecurangan. Program ini memiliki kebijakan yang ketat dalam pencegahan dan penanganan masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak, eksploitasi seksual, pelecehan, dan kekerasan. Semua personel Program SKALA diwajibkan untuk menjalani pelatihan di bidang-bidang tersebut, dengan tingkat kelulusan lebih dari 97% per Juni 2024. Langkah-langkah pencegahan kecurangan di Program SKALA sangatlah ketat, dengan pelatihan anti-penyuapan dan kesadaran akan kecurangan menjadi hal yang wajib.

Lampiran 1. Rancangan Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025

Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025 EOPO 1

Capaian Akhir Program (EOPO 1) : Kondisi pemampu yang lebih kuat bagi penyediaan layanan dasar di daerah

Kementerian/Lembaga mengembangkan dan menerapkan kebijakan, rencana, dan anggaran yang lebih baik untuk memperkuat penyediaan layanan dasar di daerah tertinggal.

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
1	Capaian Antara 1: Kementerian/Lembaga memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan mengenai Pengelolaan Keuangan Publik dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah				
	1.1	Dukungan penguatan pendapatan daerah			
		1.1.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang PDRD		
		*	1.1.1.1	Input teknis penyusunan kebijakan terkait PDRD	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pusat
		*	1.1.1.2	Input teknis pengembangan metode penghitungan potensi PDRD	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pusat
		*	1.1.1.3	Input teknis penyusunan panduan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis digitalisasi	Kemendagri - Dit. Pendapatan Daerah Pusat
		*	1.1.1.4	Input teknis penyusunan alat ukur penilaian target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD)	Kemendagri - Dit. Pendapatan Daerah Pusat
		*	1.1.1.5	Fasilitasi teknis optimalisasi pemanfaatan instrumen dan administrasi perpajakan	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pusat
		*	1.1.1.6	Input teknis pengolahan data PAD	Kemendagri - Dit. Pendapatan Daerah Pusat
		*	1.1.1.7	Fasilitasi teknis penguatan kapasitas perumus kebijakan PDRD di tingkat pusat	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	1.1.2	Penguatan peran pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan PDRD			
	*	1.1.2.1	Input teknis penyusunan desain peningkatan kapasitas pengelola PDRD di daerah	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pusat
	*	1.1.2.2	Fasilitasi teknis monev PDRD di daerah	Kemendagri - Dit. Pendapatan Daerah	Pusat
	*	1.1.2.3	Fasilitasi teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan PDRD melalui forum Pengelola Pendapatan Daerah	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pusat
1.2	Dukungan penguatan pengelolaan transfer ke daerah				
	1.2.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang Dana Alokasi Umum			
	*	1.2.1.1	Input teknis penyusunan klasterisasi daerah sebagai masukan pada kebijakan DAU	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Umum	Pusat
	*	1.2.1.2	Input teknis perbaikan kebijakan DAU Specific Grant dalam pemenuhan layanan dasar bidang pendidikan	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Umum	Pusat
	*	1.2.1.3	Input teknis penyusunan pembagian proporsi alokasi DAU bidang pendidikan menengah sesuai dengan UU otonomi khusus Papua	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Umum	Pusat
	*	1.2.1.4	Rekomendasi teknis daftar kegiatan dan sub-kegiatan yang mendukung pencapaian SPM bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dalam rangka penentuan arah penggunaan DAU Specific Grant	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Umum	Pusat
	1.2.2	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang Dana Alokasi Khusus			
	*	1.2.2.1	Fasilitasi teknis evaluasi pelaporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik	Bappenas - Dit. Pembangunan Daerah	Pusat
		1.2.2.2	Input teknis penyusunan mekanisme tata kelola dan koordinasi pengelolaan DAK Fisik di daerah	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
	*	1.2.2.3	Input teknis penyusunan kebijakan DAK Non Fisik bidang pendidikan dan kesehatan (stunting) yang mendukung pelayanan dasar	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Khusus	Pusat
	*	1.2.2.4	Input teknis penyusunan tata kelola mekanisme DAK Fisik dan Hibah bidang air minum dan sanitasi	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Khusus	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
		1.2.2.5	Input teknis pengembangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (BOK Puskesmas) pada Provinsi/Kabupaten/Kota	Kemendagri - Dit. Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah	Pusat
	*	1.2.2.6	Input teknis penyusunan kebijakan tentang pengelolaan hibah kepada daerah	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Khusus	Pusat
	1.2.3	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang Dana Bagi Hasil			
	*	1.2.3.1	Input teknis kajian pemanfaatan DBH, di daerah dengan kategori DBH tinggi, dalam mendukung penyediaan layanan dasar	Bappenas - Dit. Pembangunan Daerah	Pusat
	*	1.2.3.2	Rekomendasi teknis kebijakan dan alokasi penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Sawit untuk pemenuhan layanan dasar yang inklusif	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Umum	Pusat
		1.2.3.3	Input teknis pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan pemanfaatan DBH Tambahan Migas Otsus dalam rangka pemenuhan belanja wajib SPM	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Umum	Pusat
	1.2.4	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang Dana Desa			
	*	1.2.4.1	Input teknis kajian pemanfaatan dana desa sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan alokasi dana desa	Bappenas - Dit. Pembangunan Daerah	Pusat
		1.2.4.2	Input teknis perumusan IKD Dana Desa	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
	*	1.2.4.3	Input teknis rancangan formula dana desa dengan metode earmark dan/atau non earmark	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
	1.2.5	Penguatan peran pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan TKD			
	*	1.2.5.1	Fasilitasi teknis pengembangan desain peningkatan kapasitas terkait kebijakan HKPD	Kemenkeu - Setditjen Perimbangan Keuangan	Pusat
	*	1.2.5.2	Input teknis evaluasi kebijakan penyaluran TKD	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
		1.2.5.3	Input teknis pengembangan strategi komunikasi dan layanan informasi publik terkait implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022	Kemenkeu - Setditjen Perimbangan Keuangan	Pusat
		1.2.5.4	Input teknis penyusunan Grand Design Program Belajar TKD dan Tata Kelola Ekonomi Daerah bersama DJPK (BETTER w/ DJPK)	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Pusat
	1.3.	Dukungan penguatan pengelolaan dana abadi daerah			
	1.3.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang DAD			
	*	1.3.1.1	Input teknis penyusunan buku pedoman pelaksanaan DAD	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Pusat
	1.4	Dukungan penguatan tata kelola dana otonomi khusus			
	1.4.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang dana otonomi khusus Aceh			
		1.4.1.1	Input teknis penyusunan rekomendasi pemutakhiran kebijakan pengalokasian dan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
	*	1.4.1.2	Input teknis penyusunan kebijakan tentang keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
	*	1.4.1.3	Input teknis kajian tata kelola dana Otsus Provinsi Aceh	Kemendagri - Dit. Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah	Pusat
	1.4.2	Penguatan peran pembinaan dan pengawasan terkait dana otonomi khusus Aceh			
	*	1.4.2.1	Input teknis penguatan implementasi kebijakan tentang tata kelola Otsus di Aceh sesuai dengan PMK33	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
	*	1.4.2.2	Fasilitasi teknis evaluasi RAP Provinsi Aceh	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	1.4.2.3	Fasilitasi teknis evaluasi RAP Kabupaten/kota di Provinsi Aceh	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
	*	1.4.2.4	Fasilitasi teknis monitoring dan evaluasi lintas K/L untuk peningkatan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh	Kemendagri - Dit. Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah	Pusat
		1.4.2.5	Input teknis penyusunan laporan monitoring dan evaluasi belanja dana otonomi khusus Aceh	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
		1.4.2.6	Input teknis penyusunan dokumentasi capaian dan hasil-hasil pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
		1.4.2.7	Input teknis penyusunan dokumentasi praktik baik pembangunan dan pemanfaatan dana Otsus Aceh	Bappenas - Dit. Regional I	Pusat
	1.4.3	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang dana otonomi khusus Wilayah Papua			
		1.4.3.1	Input teknis penyusunan rekomendasi pemutakhiran kebijakan pengalokasian dan pemanfaatan dana otonomi khusus Wilayah Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
	*	1.4.3.2	Input teknis tentang penyelenggaraan kewenangan khusus di Papua	Kemendagri - Dit. Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD	Pusat
	1.4.4	Penguatan peran pembinaan dan pengawasan terkait dana otonomi khusus Wilayah Papua			
	*	1.4.4.1	Input teknis pengembangan desain pengembangan kapasitas pemanfaatan SIPPP, termasuk pedoman dan bahan pelatihan	Bappenas - Dit. Regional III	Pusat
	*	1.4.4.2	Input teknis penguatan implementasi kebijakan tentang tata kelola Otsus di Papua sesuai dengan PMK33	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
	*	1.4.4.3	Fasilitasi teknis evaluasi RAP Provinsi di Wilayah Papua	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	1.4.4.4	Fasilitasi teknis evaluasi RAP Kabupaten/kota di Wilayah Papua	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
	*	1.4.4.5	Input teknis penyusunan perhitungan kebutuhan pendanaan program prioritas dalam RAPP 2025-2029	Bappenas - Dit. Regional III	Pusat
	*	1.4.4.6	Fasilitasi teknis monitoring dan evaluasi lintas K/L untuk peningkatan pemanfaatan dana otonomi khusus Wilayah Papua	Kemendagri - Dit. Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah	Pusat
		1.4.4.7	Input teknis penyusunan laporan monitoring dan evaluasi belanja dana otonomi khusus Wilayah Papua	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
		1.4.4.8	Input teknis penyusunan dokumentasi capaian dan hasil-hasil pemanfaatan dana otonomi khusus Wilayah Papua	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
		1.4.4.9	Fasilitasi teknis penguatan forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan tata kelola otonomi khusus	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Pusat
1.5	Dukungan penguatan pengelolaan implementasi penerapan SPM				
	1.5.1	Fasilitasi penyusunan dan pemutakhiran pedoman teknis penerapan SPM			
	*	1.5.1.1	Input teknis kajian asimetris berbasis tipologi wilayah dalam rangka Penerapan SPM di Daerah untuk RPJMN 2025-2029	Bappenas - Dit. Pembangunan Daerah	Pusat
	*	1.5.1.2	Input teknis penyusunan rancangan pedoman pelaksanaan penerapan SPM	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
	*	1.5.1.3	Input teknis penyusunan kebijakan terkait SOP & Juknis Tim Penerapan SPM Prov/Kab/Kota	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
		1.5.1.4	Input teknis penyempurnaan proses bisnis pemanfaatan aplikasi e-SPM	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
		1.5.1.5	Input teknis penyusunan mekanisme dan proses bisnis pengaduan masyarakat dalam penerapan SPM di daerah	Bappenas - Dit. Pembangunan Daerah	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	1.5.2	Fasilitasi pengembangan pedoman perhitungan kebutuhan pembiayaan SPM			
	*	1.5.2.1	Input teknis penyusunan pedoman costing SPM	Bappenas - Dit. Pembangunan Daerah	Pusat
	*	1.5.2.2	Input teknis pengembang fitur kalkulator costing pada aplikasi e-SPM	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
	*	1.5.2.3	Input teknis penyusunan modul bimbingan teknis pemanfaatan kalkulator costing untuk penganggaran SPM	Bappenas - Dit. Pembangunan Daerah	Pusat
	1.5.3	Penguatan peran pembinaan dan pengawasan terkait penerapan SPM			
		1.5.3.1	Input teknis pengembangan tipologi/klasterisasi wilayah dalam penerapan SPM	Bappenas - Dit. Pembangunan Daerah	Pusat
	*	1.5.3.2	Input teknis penyusunan panduan pemantauan dan evaluasi SPM lintas K/L	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
	*	1.5.3.3	Input teknis penyusunan desain peningkatan kapasitas penerapan SPM yang berkelanjutan	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
	*	1.5.3.4	Input teknis penyusunan kebijakan dan pedoman bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan penerapan dan pemenuhan SPM, termasuk pemanfaatan aplikasi E-Revu	Kemendagri - Inspektorat II	Pusat
		1.5.3.5	Input teknis penyusunan desain peningkatan kapasitas, panduan dan modul pelatihan terkait pemanfaatan E-Revu dan pengawasan penerapan dan pemenuhan SPM	Kemendagri - Inspektorat II	Pusat
		1.5.3.6	Input teknis pelaksanaan pengawasan penerapan dan pemenuhan SPM di daerah, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi E-Revu	Kemendagri - Inspektorat II	Pusat
	*	1.5.3.7	Fasilitasi teknis peran pembinaan, dan pengawasan penerapan SPM melalui mekanisme penghargaan kepada daerah	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
1.6	Dukungan penguatan perencanaan daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif, berkualitas, dan partisipatif				
	1.6.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan, pedoman, dan pemutakhiran nomenklatur tentang perencanaan daerah			
	*	1.6.1.1	Input teknis pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	1.6.1.2	Input teknis penyusunan kebijakan tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Pusat
	*	1.6.1.3	Input teknis penyusunan kebijakan tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Pusat
		1.6.1.4	Input teknis revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2018 tentang revidi atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	Kemendagri - Inspektorat II	Pusat
	*	1.6.1.5	Input teknis pengembangan basis data kinerja provinsi sebagai bahan rekomendasi penentuan lokasi prioritas	Bappenas - Dit. Regional II	Pusat
	*	1.6.1.6	Input teknis penyusunan rekomendasi strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah melalui penyediaan layanan dasar di wilayah regional I	Bappenas - Dit. Regional I	Pusat
	*	1.6.1.7	Input teknis penyusunan rekomendasi strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah melalui penyediaan layanan dasar di wilayah regional II	Bappenas - Dit. Regional II	Pusat
	*	1.6.1.8	Input teknis pengembangan strategi penyediaan layanan dasar mempertimbangkan konteks-konteks khusus, termasuk sosio-kultural, transmigrasi, dan sebagainya di wilayah regional I	Bappenas - Dit. Regional I	Pusat
		1.6.1.9	Input teknis pengembangan strategi penyediaan layanan dasar mempertimbangkan konteks-konteks khusus, termasuk sosio-kultural, transmigrasi, dan sebagainya di wilayah regional II	Bappenas - Dit. Regional II	Pusat
	*	1.6.1.10	Input teknis pembentukan forum koordinasi dan harmonisasi para pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah regional III	Bappenas - Dit. Regional III	Pusat
		1.6.1.11	Input teknis penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan wilayah kawasan timur Indonesia	Bappenas - Dit. Regional III	Pusat
		1.6.1.12	Input teknis pengembangan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas - Dit. Regional II	Pusat
		1.6.2	Penguatan peran pembinaan dan pengawasan terkait perencanaan daerah dan integrasi rencana aksi tematik dalam perencanaan daerah		
	*	1.6.2.1	Input teknis penyusunan pedoman peningkatan kapasitas tenaga perencana dalam menyusun matriks cascading perencanaan	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Pusat
1.7	Dukung penguatan penganggaran daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif				

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN	
		1.7.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang penganggaran daerah			
		*	1.7.1.1	Input Teknis Penyusunan Kebijakan tentang Pedoman Penyusunan APBD	Kemendagri - Dit. Perencanaan Anggaran Daerah	Pusat
		*	1.7.1.2	Input teknis penguatan tata kelola evaluasi APBD, sebagai basis pengembangan modul evaluasi APBD melalui SIPD-RI	Kemendagri - Dit. Perencanaan Anggaran Daerah	Pusat
		*	1.7.1.3	Hasil kajian belanja tahunan pengeluaran dan pendapatan keuangan publik di daerah (Subnational PERA)	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Pusat
		*	1.7.1.4	Input teknis penyusunan desain klasterisasi wilayah dan strategi pemenuhan belanja wajib	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Pusat
		*	1.7.1.5	Input teknis penyusunan kebijakan tentang pemetaan penganggaran Belanja Daerah berorientasi pada Pemenuhan SPM dalam penyusunan APBD	Kemendagri - Dit. Perencanaan Anggaran Daerah	Pusat
		*	1.7.1.6	Input teknis penyusunan kebijakan tata kelola sinergi BAS	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat
		*	1.7.1.7	Input teknis penyusunan dokumen tentang desain arah kebijakan makro dan fiskal yang bersifat kewilayahan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA PPAS.	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Pusat
		*	1.7.1.8	Input teknis implementasi kebijakan sinergi pendanaan pusat dan daerah	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Pusat
		*	1.7.1.9	Input teknis penyusunan konsep indeks sinergi fiskal pusat dan daerah terkait layanan dasar	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Pusat
		1.7.2.	Penguatan peran pembinaan dan pengawasan terkait penganggaran daerah			
		*	1.7.2.1	Fasilitasi teknis peningkatan kapasitas tenaga perencanaan dan penganggaran daerah dalam kerangka implementasi sinergi BAS	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
2	Capaian Antara 2: Kementerian/Lembaga menggunakan bukti/data dalam memperkuat perencanaan, koordinasi, dan penentuan prioritas desentralisasi				
	2.1	Dukungan penguatan kebijakan dan kelembagaan satu data daerah			
		2.1.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang pengelolaan satu data daerah		
	*	2.1.1.1	Fasilitasi teknis diseminasi kebijakan tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
	*	2.1.1.2	Input teknis penyusunan <i>grand design</i> satu data pemerintahan dalam negeri (SDPDN)	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
	*	2.1.1.3	Input teknis penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan forum dan pelaksanaan rencana aksi SDPDN, termasuk petunjuk teknis cakupan data pemerintahan dalam negeri, SOP perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data dalam kerangka SDPDN, petunjuk teknis penyebarluasan data melalui portal SDPDN, dan tata cara pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi SDPDN	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
	*	2.1.1.4	Rekomendasi teknis data prioritas lintas komponen dan daerah	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
	*	2.1.1.5	Input teknis penyusunan kebijakan tentang tata kelola, pemanfaatan, dan pemutakhiran REGSOSEK	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
	*	2.1.1.6	Input teknis penyusunan pedoman pemanfaatan REGSOSEK untuk perencanaan daerah	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Pusat
		2.1.1.7	Input teknis penyusunan standar data keuangan daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat
	*	2.1.1.8	Hasil kajian tentang peta kesiapan Pemprov/Pemda lokasi SKALA dalam penerapan Satu Data Daerah	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
		2.1.2	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang penerapan standar SPBE		
	*	2.1.2.1	Fasilitasi teknis rapat koordinasi penyelenggaraan SPBE pemerintah daerah di Provinsi NTB	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
		2.1.2.2	Input teknis penyusunan peta rencana dan arsitektur SPBE Kemendagri	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
	*	2.1.2.3	Input teknis penyusunan kebijakan dan panduan terkait implementasi SPBE pemerintah daerah	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
	2.1.3	Penguatan peran pembinaan dan pengawasan terkait satu data daerah			
	*	2.1.3.1	Input teknis penyusunan desain peningkatan kapasitas pengelola satu data daerah	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
	*	2.1.3.2	Fasilitasi teknis berbagi pembelajaran tentang pelaksanaan satu data daerah	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
2.2	Dukungan penguatan sistem informasi tingkat desa				
	2.2.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang pemanfaatan sistem informasi tingkat desa			
	*	2.2.1.1	Rekomendasi teknis terkait proses bisnis pemutakhiran dan keterhubungan SEPAKAT dengan sistem informasi di tingkat desa untuk pemutakhiran data REGSOSEK yang dikaitkan dengan Pencatatan Statistik Hayati	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
	*	2.2.1.2	Input teknis penyusunan kebijakan bagi pakai data yang bersumber sistem informasi di tingkat desa sesuai standar SPBE	Bappenas - Dit. Pembangunan Daerah	Pusat
2.3	Dukungan penguatan sistem dan integrasi antar sistem pengelolaan data				
	2.3.1	Fasilitasi penguatan dan integrasi sistem-sistem pengelolaan data			
	*	2.3.1.1	Input teknis penyusunan proses bisnis integrasi SEPAKAT dengan sistem KL lainnya, antara lain SIPD, SIKD, dan SIPPP	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
	*	2.3.1.2	Input teknis penyiapan sistem untuk integrasi SEPAKAT dengan SIPD-RI, SIKD, dan SIPPP termasuk SEPAKAT-KL	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
		2.3.1.3	Input teknis integrasi antar sistem pengelola data yang terkait dengan proses bisnis SIPD-RI	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	2.3.1.4	Input teknis integrasi SIPD-RI dan SEPAKAT	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
	*	2.3.1.5	Rekomendasi teknis kebijakan dan proses bisnis integrasi dan interoperabilitas data SIKD dengan sistem lainnya, terutama integrasi SIKD, SIPD-RI, dan SIPPP	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat
		2.3.1.6	Input teknis pengembangan dan uji coba integrasi SIKD dengan SIPD-RI, SEPAKAT dan sistem KL lain yang relevan	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat
	*	2.3.1.7	Input teknis integrasi SIPPP dengan SIPD-RI dan SIKD-Otsus	Bappenas - Dit. Regional III	Pusat
	*	2.3.1.8	Input teknis integrasi dan pemanfaatan data (salah satunya) melalui SIPD-Hub	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
	*	2.3.1.9	Input teknis integrasi e-SPM dengan SIPD RI	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Pusat
	*	2.3.1.10	Input teknis pemutakhiran dan pemanfaatan aplikasi E-Review, termasuk integrasi E-Review dan SIPD-RI	Kemendagri - Inspektorat II	Pusat
		2.3.1.11	Input teknis pengembangan mekanisme pemantauan DAK melalui SIPD-RI	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
	*	2.3.1.12	Input teknis pengembangan SIKD Otsus	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat
		2.3.1.13	Input teknis pengembangan SIKD Teman Desa	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat
		2.3.1.14	Input teknis identifikasi pemanfaatan <i>Large Language Model</i> (LLM) di SIKD	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat
		2.3.1.15	Input teknis pemutakhiran aplikasi Verifikasi Data Nasional (VERDANA)	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat
		2.3.2	Penguatan kapasitas pengelolaan SIPD-RI		
	*	2.3.2.1	Input teknis penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait SIPD-RI	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT					PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
		*	2.3.2.2	Input teknis penyiapan dokumentasi proses sebagai persiapan proses sertifikasi ISO terhadap SIPD-RI	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat
	2.4	Dukungan penguatan analisis, pemutakhiran, dan pemanfaatan data				
		2.4.1	Pengembangan kerangka analisis data mikro, makro, dan sektor termasuk analisis kebutuhan pemenuhan SPM untuk perencanaan daerah			
		*	2.4.1.1	Input teknis daftar indikator REGSOSEK terkait SPM dalam analisis SEPAKAT dan input terhadap SIPD Hub	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
		*	2.4.1.2	Input teknis pemanfaatan data REGSOSEK dalam rangka mendukung implementasi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Pusat
			2.4.1.3	Input teknis perluasan kerangka analisis data keuangan untuk isu tematik (<i>dashboard monitoring</i>) dalam rangka mendukung sinergi kebijakan fiskal	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Pusat
			2.4.1.4	Input teknis penyusunan kerangka analisis pemanfaatan data mikro, makro dan sektor untuk masukan perencanaan penganggaran daerah	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
		*	2.4.1.5	Input teknis uji coba pemanfaatan data non-konvensional untuk adaptasi perubahan iklim dan penyediaan layanan dasar di Provinsi NTB	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
		2.4.2	Penguatan peran pembinaan terkait analisis data mikro terpilah untuk analisis kebutuhan pemenuhan SPM dan perencanaan daerah			
		*	2.4.2.1	Input teknis penyiapan dan fasilitasi hak akses data REGSOSEK melalui SEPAKAT	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
		*	2.4.2.2	Input teknis fasilitasi pemadanan data REGSOSEK dengan data pemerintah daerah dan data K/L lainnya	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
			2.4.2.3	Input Teknis pengembangan kurikulum, modul, panduan pelatihan pemanfaatan data REGSOSEK melalui SEPAKAT untuk Pemerintah Pusat	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
			2.4.2.4	Input teknis penyusunan panduan penggunaan SEPAKAT terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan GEDSI	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	2.4.2.5	Input Teknis perluasan peningkatan kapasitas Master of Training dalam pemanfaatan data REGSOSEK melalui SEPAKAT	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
	*	2.4.2.6	Input teknis penguatan kapasitas aparatur perencana daerah untuk melakukan analisis berbasis data tersedia di SEPAKAT, Portal data dan atau SIPD Hub untuk kebutuhan pemenuhan SPM dan penyusunan dokumen perencanaan daerah	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
	*	2.4.2.7	Input teknis pengembangan materi penunjang peningkatan kapasitas (modul, video, dan alat penunjang lainnya) dan edukasi publik satu data REGSOSEK untuk pembelajaran secara langsung maupun melalui LMS	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
		2.4.2.8	Fasilitasi teknis berbagi pengalaman pemanfaatan data REGSOSEK dalam perencanaan daerah	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
		2.4.3	Fasilitasi pemutakhiran data mikro terpilih		
	*	2.4.3.1	Input teknis penyusunan proses bisnis dan panduan sistem pemutakhiran data REGSOSEK secara otomatisasi (integrasi)	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
	*	2.4.3.2	Input teknis penyiapan modul pemutakhiran data REGSOSEK dalam sistem SEPAKAT	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
	*	2.4.3.3	Input teknis uji coba pemutakhiran data REGSOSEK dengan berbagai platform data	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
	*	2.4.3.4	Fasilitasi teknis penyediaan pelatih pengelolaan sistem pemutakhiran data REGSOSEK dan sistem terintegrasi di daerah	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat
	*	2.4.3.5	Rekomendasi teknis panduan/kurikulum pengelolaan sistem pemutakhiran data REGSOSEK dan sistem terintegrasi bagi daerah	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
3	Capaian Antara 3: Kementerian/Lembaga meningkatkan pemanfaatan analisis dan bukti mengenai GEDSI dalam menyiapkan kebijakan, perencanaan, dan anggaran guna memastikan pemenuhan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan				
	3.1	Dukungan penguatan perencanaan daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif			
		3.1.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan, pedoman, dan rencana aksi pengurangan kemiskinan, pengarusutamaan gender, disabilitas, dan kelanjutusiaan		
		*	3.1.1.1	Input teknis penguatan pengarusutamaan gender dalam penyusunan RPJMN	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Pusat
		*	3.1.1.2	Input teknis dalam penyusunan rencana aksi nasional pembangunan kesetaraan gender	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Pusat
		*	3.1.1.3	Input teknis penyusunan pedoman penyusunan rencana aksi daerah pembangunan kesetaraan gender	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Pusat
		*	3.1.1.4	Input teknis uji coba penyusunan rencana aksi daerah pembangunan kesetaraan gender di Aceh dan NTB	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Pusat
		*	3.1.1.5	Input teknis pengembangan desain penguatan kapasitas terkait pengarusutamaan gender	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Pusat
			3.1.1.6	Input teknis penyusunan strategi komunikasi RPJPN Indonesia Emas (IE) 14 tentang Pengarusutamaan Gender	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Pusat
		*	3.1.1.7	Input teknis penyusunan rekomendasi kebijakan tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) yang mendukung pengarusutamaan gender (PUG) di daerah	Kemenkeu - Setditjen Perimbangan Keuangan Pusat
		*	3.1.1.8	Input teknis buku pedoman <i>tagging</i> GEDSI dalam SIKD	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	3.1.1.9	Input teknis evaluasi RAN PD untuk <i>Presidential Report</i>	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
	*	3.1.1.10	Input teknis evaluasi komprehensif operasionalitas dan ketercapaian RAN PD	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
	*	3.1.1.11	Input teknis penyusunan regulasi dan kebijakan penyandang disabilitas	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
		3.1.1.12	Input teknis penyusunan pedoman perhitungan anggaran untuk penyandang disabilitas	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
	*	3.1.1.13	Input teknis pembaruan regulasi dan kebijakan tentang kelanjutusiaan	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
	*	3.1.1.14	Input teknis tinjauan dan penajaman indikator dan definisi operasional terkait disabilitas dan lansia dalam regulasi pemenuhan layanan dasar di K/L teknis	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
	*	3.1.1.15	Input Teknis Penguatan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah termasuk aspek GEDSI dalam rangka mendukung kebijakan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS Daerah	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat
		3.1.1.16	Fasilitasi Peningkatan Peran <i>Regional Chief Economist</i> Pemerintah Daerah dalam PPRG	Kemenkeu - Setditjen Perimbangan Keuangan	Pusat
		3.1.1.17	Fasilitasi kebijakan kolaborasi Kemenkeu Satu dan <i>Special Mission Vehicle (SMV)</i> untuk akselerasi Kebijakan PUG di Daerah	Kemenkeu - Setditjen Perimbangan Keuangan	Pusat
		3.1.2	Penguatan peran pembinaan dan pengawasan terkait implementasi kebijakan pengurangan kemiskinan, pengarusutamaan gender, disabilitas, dan kelanjutusiaan		
	*	3.1.2.1	Fasilitasi teknis penggunaan GEDSI Tagging dalam perencanaan dan penganggaran di daerah	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	3.1.2.2	Input teknis fasilitasi pemanfaatan data REGSOSEK untuk dokumen perencanaan (Renaksi PD, Renaksi Lansia)	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
		3.1.2.3	Fasilitasi teknis pengarusutamaan perspektif GEDSI dalam kerja sama daerah dan lingkup Kemendagri	Kemendagri - Pusat Fasilitasi Kerja Sama	Pusat
	*	3.1.2.4	Input teknis dan fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan kerangka analisis pemanfaatan data mikro, makro dan sektor	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
3.2	Dukungan penguatan partisipasi, representasi, dan pengaruh kelompok rentan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan				
	3.2.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pedoman tentang partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan			
	*	3.2.1.1	Input teknis penyusunan panduan pelaksanaan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Pusat
	*	3.2.1.2	Input teknis penyusunan mekanisme dan pedoman penyelenggaraan musyawarah perencanaan tematik	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
		3.2.1.3	Fasilitasi pengembangan mekanisme monitoring pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan daerah	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
	*	3.2.1.4	Input teknis materi Lomba Bedah Data APBD Tahun 2025 terkait GEDSI kepada pelajar SMA/SMK/MA/Sederajat	Kemenkeu - Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	Pusat

Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025 - CAPAIAN AKHIR PROGRAM (EOPO) 2

Capaian Akhir Program (EOPO 2) : Penyediaan layanan dasar di daerah yang lebih baik

Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran mampu merencanakan, menganggarkan, dan mengelola penyediaan layanan dasar secara lebih efektif

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN	
4	Intermediate Outcome 4: Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran mampu mengelola keuangan publik dengan lebih baik untuk meningkatkan layanan dasar yang sesuai Standar Pelayanan Minimal					
	4.1	Dukungan penguatan pendapatan daerah				
		4.1.1	Fasilitasi penyusunan dan implementasi regulasi dan kebijakan tentang PDRD			
		*	4.1.1.1	Rekomendasi teknis rancangan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang PDRD	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua Barat;
		*	4.1.1.2	Rekomendasi teknis desain peningkatan PAD	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		4.1.2	Fasilitasi penguatan kapasitas terkait PDRD			
		*	4.1.2.1	ASN Pemerintah daerah pada unit kerja yang relevan terlatih dalam pengelolaan PDRD	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	4.2	Dukungan penguatan pengelolaan transfer ke daerah				

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
		4.2.1	Fasilitasi penguatan kapasitas terkait Dana Alokasi Umum		
	*	4.2.1.1	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih dalam merencanakan dan mengelola Dana Alokasi Umum	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Umum	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	4.2.1.2	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih membuat perencanaan pemenuhan belanja wajib infrastruktur di daerah	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		4.2.2	Fasilitasi penguatan kapasitas terkait Dana Alokasi Khusus		
	*	4.2.2.1	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih dalam merencanakan dan mengelola Dana Alokasi Khusus	Bappenas - Dit. Pembangunan Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		4.2.3	Fasilitasi penguatan kapasitas terkait Dana Bagi Hasil		
		4.2.3.1	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih dalam merencanakan dan mengelola Dana Bagi Hasil	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Umum	Provinsi Aceh; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		4.2.4	Fasilitasi pemanfaatan hasil kajian belanja daerah untuk optimalisasi TKD		
	*	4.2.4.1	Rekomendasi teknis distribusi alokasi anggaran TKD untuk pembiayaan penerapan dan pemenuhan SPM dan isu-isu strategis pembangunan lainnya	Kemenkeu - Dit. Dana Transfer Umum	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	4.2.4.2	Rekomendasi teknis untuk penyusunan laporan kajian belanja tahunan Pengeluaran dan Pendapatan Keuangan Publik (PERA)	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	4.3	Dukungan penguatan tata kelola dana otonomi khusus			

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN	
		4.3.1	Fasilitasi penyusunan dan implementasi kebijakan dana otonomi khusus Aceh			
			4.3.1.1	Rekomendasi teknis reformulasi kebijakan program Jaminan Kesehatan Aceh	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Provinsi Aceh;
		*	4.3.1.2	Rekomendasi teknis penyusunan revisi Rencana Induk Pemanfaatan Dana OTSUS Aceh	Bappenas - Dit. Regional I	Provinsi Aceh;
		4.3.2	Fasilitasi penguatan kapasitas terkait pengelolaan dana otonomi khusus Aceh			
		*	4.3.2.1	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan, di Provinsi Aceh, terlatih mengalokasikan dana Otsus, menyusun dokumen perencanaan (termasuk RAP), Pelaporan, Penyiapan Syarat Salur melalui aplikasi SIKD-OTSUS	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Provinsi Aceh;
		4.3.3	Fasilitasi penyusunan dan implementasi kebijakan dana otonomi khusus Wilayah Papua			
		*	4.3.3.1	Input teknis penyusunan modul pelatihan pemanfaatan SIPPP untuk perencanaan OTSUS	Bappenas - Dit. Regional III	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		*	4.3.3.2	Input teknis integrasi RIPP dan RAPP dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD	Bappenas - Dit. Regional III	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		*	4.3.3.3	Rekomendasi teknis rancangan dokumen panduan pelaksanaan program prioritas	Bappenas - Dit. Regional III	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		*	4.3.3.4	Fasilitasi teknis penerapan panduan pelaksanaan program prioritas	Bappenas - Dit. Regional III	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		*	4.3.3.5	Fasilitasi teknis penyelenggaraan musrenbangsus sesuai panduan yang ditetapkan	Bappenas - Dit. Regional III	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		4.3.4	Fasilitasi penguatan kapasitas terkait pengelolaan dana otonomi khusus Wilayah Papua			

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	4.3.4.1	Kelompok perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya terlatih dalam analisa dan pemanfaatan data terpilah OAP	Bappenas - Dit. Regional III	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	4.3.4.2	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan, di Wilayah Papua, terlatih mengalokasikan dana Otsus, menyusun dokumen perencanaan (termasuk RAP), Pelaporan, Penyiapan Syarat Salur melalui aplikasi SIKD-OTSUS	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	4.3.4.3	Input teknis peningkatan kapasitas DPRP dan MRP dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan pelaksanaan otonomi khusus	Kemendagri - Dit. Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
4.4	Dukungan penguatan pengelolaan implementasi penerapan SPM				
	4.4.1	Fasilitasi penyusunan kebijakan tentang kelembagaan tata kelola data penerapan dan pemenuhan SPM			
	*	4.4.1.1	Rekomendasi teknis penyusunan kebijakan daerah tentang kelembagaan tata kelola data penerapan dan pemenuhan SPM	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	4.4.2	Fasilitasi penguatan kapasitas dan penyusunan rencana aksi penerapan SPM			
	*	4.4.2.1	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih penyusunan rencana aksi penerapan SPM (termasuk tahapan penerapan SPM, indikator mutu SPM, costing SPM, dll.)	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	4.4.2.2	Rekomendasi teknis tentang rencana aksi penerapan SPM	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	4.4.3	Fasilitasi perhitungan kebutuhan pembiayaan SPM			

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	4.4.3.1	Rekomendasi teknis komponen belanja dan unit cost perhitungan kebutuhan penerapan SPM, sesuai standar satuan harga daerah	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	4.4.4	Penguatan peran koordinasi dan pembinaan tim penerapan SPM Daerah Provinsi			
	*	4.4.4.1	Input teknis pembentukan dan/atau revitalisasi Tim Penerapan SPM	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	4.4.4.2	Rekomendasi teknis tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan capaian penerapan SPM	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Provinsi NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		4.4.4.3	Rekomendasi teknis penyusunan keputusan tentang kelembagaan Korbinwas penerapan SPM melalui klinik konsultasi SPM	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Provinsi Aceh;
	4.5	Dukungan penguatan perencanaan daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif			
	4.5.1	Fasilitasi penguatan kapasitas terkait perencanaan daerah termasuk pengintegrasian berbagai rencana aksi tematik			
	*	4.5.1.1	ASN Pemprov pada unit kerja yang relevan terlatih dalam menyusun perencanaan, termasuk pemanfaatan cascade nomenklatur rumusan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;
	*	4.5.1.2	Fasilitasi teknis penguatan kapasitas jabatan fungsional analis kebijakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan untuk layanan dasar yang inklusif	Kemendagri - Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	4.5.2	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan daerah			
	*	4.5.2.1	Hasil analisis pemetaan tantangan dan isu-isu strategis pembangunan daerah terkait penyediaan layanan dasar	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	4.5.2.2	Input teknis rancangan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar yang inklusif	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Barat;
	*	4.5.2.3	Input teknis rancangan dokumen RPJMD tahun 2025-2029 yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar yang inklusif	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	4.5.2.4	Input teknis rancangan dokumen RKPd yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar yang inklusif	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
4.6.	Dukungan penguatan penganggaran daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif				
	4.6.1	Fasilitasi penguatan kapasitas terkait penganggaran daerah			
	*	4.6.1.1	ASN Pemprov pada unit kerja yang relevan terlatih dalam penyusunan penganggaran, termasuk penyusunan KUA PPAS yang selaras dengan KEM PPKF Regional dan pemanfaatan SIPD-RI dalam penganggaran	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	4.6.1.2	ASN Pemprov terlatih dalam pemanfaatan nomenklatur belanja terbaru dan kekhususan Wilayah Papua	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	4.6.2	Fasilitasi penyusunan dokumen penganggaran daerah			
	*	4.6.2.1	Rekomendasi teknis untuk KUA PPAS yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	4.6.2.2	Rekomendasi teknis perhitungan kebutuhan pembiayaan penerapan dan pemenuhan layanan dasar, kebutuhan disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya	Kemendagri - Dit. Perencanaan Anggaran Daerah	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN	
5	Capaian Antara 5: Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran memperkuat pemanfaatan bukti/data mengenai kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat rentan dalam penetapan rencana dan anggaran layanan dasar					
	5.1	Dukungan penguatan kebijakan dan kelembagaan satu data daerah				
		5.1.1	Fasilitasi penguatan kelembagaan pengelola satu data daerah			
		*	5.1.1.1	Rekomendasi teknis penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Satu Data Daerah	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		*	5.1.1.2	Rekomendasi teknis tentang pedoman tata kelola forum satu data daerah	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;
		*	5.1.1.3	Rekomendasi teknis tata kelola pengelolaan SEPAKAT di daerah	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Maluku;
		*	5.1.1.4	Rekomendasi teknis tentang arsitektur dan peta rencana SPBE	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi Maluku; Papua Barat;
		5.1.2	Fasilitasi penguatan kapasitas pengelola satu data daerah			
		*	5.1.2.1	ASN Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota pada unit kerja yang relevan terlatih untuk pengelolaan satu data	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	5.2	Dukungan penguatan sistem informasi tingkat desa				
		5.2.1	Fasilitasi identifikasi dan pemutakhiran sistem informasi tingkat desa milik daerah yang memuat variabel data REGSOSEK			

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	5.2.1.1	Rekomendasi teknis tentang kerangka pengembangan Sistem Informasi di tingkat desa yang memuat variabel data REGSOSEK	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo;
	*	5.2.1.2	Input teknis pemutakhiran sistem informasi di tingkat desa yang sudah ada	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Provinsi Aceh; NTB; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		5.2.2	Fasilitasi pengembangan mekanisme pembinaan dan penganggaran untuk penguatan dan perluasan sistem informasi tingkat desa		
	*	5.2.2.1	Rekomendasi teknis rancangan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pedoman penggunaan yang mendukung pengelolaan, pembinaan, dan perluasan sistem informasi di tingkat desa	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Aceh; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	5.3	Dukungan penguatan sistem dan integrasi antar sistem pengelolaan data			
		5.3.1	Fasilitasi penguatan dan integrasi sistem pengelolaan data tingkat daerah dan pusat		
	*	5.3.1.1	Rekomendasi teknis tentang skema integrasi aplikasi daerah dengan aplikasi SEPAKAT	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Provinsi NTT; NTB; Gorontalo; Papua;
	*	5.3.1.2	Input teknis penyesuaian platform data daerah untuk integrasi dengan sistem data di pusat	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi Aceh; Kalimantan Utara;
	*	5.3.1.3	Rekomendasi teknis tentang <i>grand design</i> jaringan intra pemerintah daerah dan sistem penghubung layanan pemerintah	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi Kalimantan Utara; Maluku;
		5.3.2	Fasilitasi penguatan kapasitas penggunaan dan pemanfaatan SIPD-RI		
	*	5.3.2.1	Terlatihnya pelatih aplikasi SIPD RI di tingkat provinsi	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	5.3.2.2	Fasilitasi teknis pengembangan mekanisme pendampingan Pemprov/Pemda dalam penggunaan SIPD-RI	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi NTT; NTB; Kalimantan Utara; Maluku;

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
5.4	Dukungan penguatan analisis, pemutakhiran, dan pemanfaatan data				
5.4.1	Fasilitasi pengembangan kerangka analisis data mikro, makro, dan sektor untuk analisis kebutuhan pemenuhan SPM dan perencanaan daerah				
*	5.4.1.1	Input pengembangan mekanisme dan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan portal satu data termasuk bagi pakai data sesuai kebutuhan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan dasar bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua Barat;	
5.4.2	Fasilitasi penguatan kapasitas terkait analisis data mikro terpilah untuk analisis kebutuhan pemenuhan SPM dan perencanaan daerah				
*	5.4.2.1	Fasilitasi teknis Tim Pelatih SEPAKAT Provinsi dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Kab/Kota untuk memanfaatkan data REGSOSEK dalam perencanaan daerah	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;	
*	5.4.2.2	Tersedianya Tim Pelatih di Provinsi untuk pelatihan pemanfaatan data REGSOSEK melalui SEPAKAT	Bappenas - Dit. Kependudukan dan Jaminan Sosial	Provinsi NTB; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat;	
*	5.4.2.3	Rekomendasi teknis tentang daftar data pembangunan prioritas untuk penyusunan perencanaan daerah, termasuk data terkait pemenuhan SPM	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;	
*	5.4.2.4	Rekomendasi teknis tentang daftar data prioritas untuk penerapan SPM	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;	
*	5.4.2.5	Rekomendasi teknis tentang pemanfaatan hasil analisis SEPAKAT untuk perencanaan daerah	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;	

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
6	Capaian Antara 6: Pejabat kunci di provinsi dan kabupaten sasaran makin memahami, mampu mengukur dan merencanakan penyediaan layanan dasar yang sesuai kebutuhan seluruh warga				
6.1	Dukungan penguatan komitmen pimpinan daerah dalam penerapan SPM dan peningkatan kualitas belanja daerah				
	6.1.1	Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait penerapan SPM			
	*	6.1.1.1	Fasilitasi teknis penyampaian kemajuan dan tantangan penerapan SPM kepada pimpinan daerah	Kemendagri - Inspektorat II	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Barat;
		6.1.1.2	Rekomendasi teknis tentang desain SPM Award bagi pemerintah Kabupaten/Kota	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Provinsi Aceh; NTT;
	6.1.2	Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait perencanaan daerah termasuk pengintegrasian berbagai rencana aksi tematik			
		6.1.2.1	Rekomendasi teknis mekanisme koordinasi, pembinaan, dan pengawasan perencanaan daerah, termasuk perencanaan daerah yang partisipatif dan inklusif	Kemendagri - Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Utara; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	6.1.3	Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait penganggaran daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif			
	*	6.1.3.1	Fasilitasi teknis penyampaian regulasi, penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif termasuk kebijakan terkait KEM PPKF Regional kepada pimpinan daerah dan TAPD	Kemenkeu - Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	6.1.3.2	Fasilitasi teknis penguatan kapasitas pimpinan daerah dalam penyediaan layanan dasar	Kemendagri - Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
6.2	Dukungan penguatan komitmen pimpinan daerah dalam pengelolaan dan penguatan kapasitas fiskal daerah				
	6.2.1	Penguatan komitmen pemimpin daerah terkait pengelolaan PDRD			

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	6.2.1.1	Fasilitasi teknis pengembangan pedoman dan panduan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan PDRD ke Kab/Kota	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;
	*	6.2.1.2	Fasilitasi teknis sinergitas pemungutan pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kemenkeu - Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;
	*	6.2.1.3	Fasilitasi teknis penguatan kapasitas pimpinan daerah terkait pendapatan daerah	Kemendagri - Dit. Pendapatan Daerah	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		6.2.2	Penguatan komitmen pemimpin daerah terkait pengelolaan TKD		
	*	6.2.2.1	Fasilitasi teknis penyampaian perkembangan tentang kebijakan-kebijakan TKD, capaian, dan kendala pengelolaan TKD kepada pimpinan daerah	Kemenkeu - Setditjen Perimbangan Keuangan	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
6.3		Dukungan penguatan komitmen pimpinan daerah dalam pemantapan siklus data daerah			
		6.3.1	Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait pengelolaan satu data daerah		
	*	6.3.1.1	Fasilitasi teknis penyampaian kemajuan dan tantangan dari forum satu data kepada pimpinan daerah	Kemendagri - Pusat Data dan Sistem Informasi	Provinsi Kalimantan Utara; Gorontalo; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		6.3.1.2	Rekomendasi teknis tentang mekanisme penyampaian regulasi, kemajuan dan tantangan dari implementasi sistem informasi tingkat kampung/desa untuk pimpinan daerah	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
6.4		Dukungan penguatan komitmen pimpinan daerah dalam optimalisasi pemanfaatan dan tata kelola dana otonomi khusus			
		6.4.1	Penguatan komitmen pemimpin daerah terkait pengelolaan dana otonomi khusus Aceh		

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	6.4.1.1	Rekomendasi teknis tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan monev dana otonomi khusus Aceh	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Provinsi Aceh;
	*	6.4.1.2	Fasilitasi teknis penyelenggaraan bimbingan teknis eksekutif kebijakan dana otonomi khusus di Aceh	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Provinsi Aceh;
	6.4.2	Penguatan komitmen pemimpin daerah terkait pengelolaan dana otonomi khusus Wilayah Papua			
		6.4.2.1	Fasilitasi teknis penyampaian kebijakan-kebijakan terbaru terkait pengelolaan dana otonomi khusus, capaian, dan kendala kepada pimpinan daerah	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
		6.4.2.2	Fasilitasi teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Otsus kepada pemerintah kabupaten/kota	Kemendagri - Dit. Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	6.4.2.3	Fasilitasi teknis penyelenggaraan bimbingan teknis eksekutif kebijakan dana otonomi khusus di Wilayah Papua	Kemenkeu - Dit. Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Provinsi Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	6.5	Dukungan penguatan komitmen pimpinan daerah dalam memastikan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan daerah			
	6.5.1	Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan			
	*	6.5.1.1	Fasilitasi teknis penyampaian isu-isu terkait kebutuhan kelompok rentan, manfaat, dan kebijakan terkait partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan daerah kepada pimpinan daerah	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Maluku;

Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025 - Capaian Akhir Program (EOPO) 3

Capaian Akhir Program (EOPO 3)	<p>: Partisipasi, representasi dan pengaruh yang lebih kuat dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya</p> <p>Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan di wilayah sasaran terwakili dan dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai penyediaan layanan dasar di daerah.</p>
---------------------------------------	---

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
7	Capaian Antara 7: Pemerintah makin kuat dalam melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah				
	7.1	Dukungan penguatan perencanaan daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif			
		7.1.1	Fasilitasi penyusunan regulasi, kebijakan, dan rencana aksi pengurangan kemiskinan, pengarusutamaan gender, disabilitas, dan kelanjutusiaan		
		*	7.1.1.1	Rekomendasi teknis penyusunan peraturan daerah tentang rencana aksi pengarusutamaan gender	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;
		*	7.1.1.2	Input teknis penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh; Gorontalo;
			7.1.1.3	Input teknis penyusunan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh;
		*	7.1.1.4	Input teknis penyusunan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh;
			7.1.1.5	Input teknis penyusunan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh;

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	7.1.1.6	Input teknis penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
	*	7.1.1.7	Hasil analisis dan rekomendasi teknis terkait fasilitas publik yang inklusif	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi NTT;
	*	7.1.1.8	Rekomendasi teknis penyusunan peraturan kepala daerah tentang kelanjutusiaan	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi NTB; NTT;
		7.1.1.9	Rekomendasi teknis penyusunan peraturan daerah tentang pemanfaatan desa adat	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi NTT;
	7.1.2	Fasilitasi penguatan kapasitas terkait implementasi kebijakan pengurangan kemiskinan, pengarusutamaan gender, disabilitas, dan kelanjutusiaan			
	*	7.1.2.1	ASN Pemprov dari unit kerja yang relevan terlatih dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif GEDSI	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;
7.2	Dukungan penguatan partisipasi, representasi, dan pengaruh kelompok rentan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan				
	7.2.1	Penguatan platform kolaborasi pemda dan jaringan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan yang inklusif			
	*	7.2.1.1	Hasil kajian <i>confidence survey</i> Jaringan Masyarakat Sipil dan Pemerintah	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;
	*	7.2.1.2	Rekomendasi teknis penyusunan model dan kelembagaan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk melalui forum perencanaan inklusif atau forum-forum tematik	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi Aceh; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;

CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	7.2.1.3	Rekomendasi teknis penyusunan kebijakan daerah tentang pelembagaan model kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk melalui forum perencanaan inklusi atau forum-forum tematik	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi NTB; NTT; Kalimantan Utara;
	*	7.2.1.4	Fasilitasi teknis penyelenggaraan model kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk melakukan pembentukan/revitalisasi forum perencanaan inklusi atau forum-forum tematik lainnya	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;

#	CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT			PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
8	Capaian Antara 8: Perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan/atau perwakilannya makin terlibat dan mempengaruhi proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah				
8.1	Dukungan penguatan partisipasi, representasi, dan pengaruh kelompok rentan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan				
	8.1.1	Fasilitasi penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil dalam pemanfaatan hasil analisis kebutuhan kelompok rentan			
	*	8.1.1.1	Fasilitasi teknis kepada Pemprov/Pemda dalam penyediaan data dan analisa kebutuhan kelompok rentan bagi jaringan masyarakat sipil	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi Aceh; Maluku;
	*	8.1.1.2	Fasilitasi teknis penyediaan hasil analisis REGSOSEK, hasil GEDSI Tagging, hasil SPM Tagging, dan kajian lainnya terkait kebutuhan kelompok rentan	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi Aceh; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo;
	*	8.1.1.3	Jaringan masyarakat sipil/simpul jaringan kelompok perempuan dan disabilitas terlatih dalam mengakses dan menganalisis data terkait kebutuhan kelompok rentan	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;
	8.1.2	Fasilitasi penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil dalam advokasi kebutuhan kelompok rentan dan kolaborasi			

#	CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT			PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	8.1.2.1	Tersedianya jaringan masyarakat sipil/simpul jaringan kelompok perempuan dan disabilitas sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran responsif GEDSI	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;
	*	8.1.2.2	Jaringan masyarakat sipil/simpul jaringan kelompok perempuan dan disabilitas terlatih dalam melakukan advokasi kebutuhan kelompok rentan dan kolaborasi	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi Aceh; NTB; NTT; Kalimantan Utara; Gorontalo; Maluku;
	*	8.1.2.3	Fasilitasi teknis penyusunan risalah kebijakan tentang pemenuhan layanan dasar bagi kelompok rentan	Bappenas - Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Provinsi Aceh;

#	CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT			PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
9	Capaian Antara 9: Sistem informasi di tingkat desa/lokal menghasilkan analisis yang lebih akurat tentang kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan sehingga memastikan penyediaan layanan dasar yang lebih inklusif				
	9.1	Dukungan penguatan sistem informasi tingkat desa			
		9.1.1	Fasilitasi kolaborasi pemda dengan Perguruan Tinggi dan CSO untuk perluasan sistem informasi tingkat desa		
	*	9.1.1.1	Rekomendasi teknis model kolaborasi pemerintah daerah dengan universitas dan organisasi masyarakat sipil untuk perluasan dan pemanfaatan sistem informasi di tingkat desa	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Aceh; NTB; Kalimantan Utara; Papua; Papua Selatan;
		9.1.2	Fasilitasi penguatan kapasitas individu dan kelembagaan daerah pengelola sistem informasi tingkat desa		
	*	9.1.2.1	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih dalam teknis pembinaan sistem informasi di tingkat desa	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi NTT; NTB; Kalimantan Utara; Gorontalo; Papua; Papua Selatan; Papua Barat; Papua Barat Daya;

Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025 – Dukungan Lintas EOPO

Dukungan Lintas EOPO	: Komunikasi, Manajemen Pengetahuan, dan Tata Kelola Program SKALA
Total Anggaran Indikatif	: Rp 11,436,750,000

#	CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT			PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
10	Komunikasi, Manajemen Pengetahuan, dan Tata Kelola Program SKALA				
	10.1	<i>Communications and Public Diplomacy</i>			
		10.1.1	Penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan diplomasi publik program SKALA		
		*	10.1.1.1	Desain dan implementasi kegiatan diplomasi publik tersusun dan dilaksanakan	Bappenas - Dit. Ketenagakerjaan Pusat
		10.1.2	Pengembangan strategi, kapasitas, dan produk komunikasi program SKALA		
		*	10.1.2.1	Materi dan produk komunikasi SKALA tersedia untuk mendukung kegiatan implementasi program	Bappenas - Dit. Ketenagakerjaan Pusat
		*	10.1.2.2	Desain dan pelaksanaan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan SKALA terkait aspek komunikasi terlaksana	Bappenas - Dit. Ketenagakerjaan Pusat
		*	10.1.2.3	Fasilitasi teknis diseminasi informasi publik melalui media massa terkait isu-isu strategis pembangunan	Bappenas - Dit. Ketenagakerjaan Pusat
		10.1.3	Fasilitasi kegiatan diplomasi dan komunikasi publik terkait tema-tema program SKALA		
		*	10.1.3.1	Fasilitasi teknis penyelenggaraan <i>Asia-Pacific Regional Conference on Population Ageing</i>	Bappenas - Dit. Ketenagakerjaan Pusat
		*	10.1.3.2	Fasilitasi teknis penguatan kolaborasi multipihak dalam rangka pengembangan kesadaran pemerintah daerah dan komunitas dalam pembangunan	Bappenas - Dit. Ketenagakerjaan Pusat

#	CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT				PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
10.2	Knowledge Management					
10.2.1	Pengelolaan pengetahuan program SKALA					
*	10.2.1.1	Fasilitasi teknis pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management/knowledge hub</i>)			Bappenas - Dit. Ketenagakerjaan	Pusat
10.3	Tata kelola dan pengelolaan sekretariat Program SKALA					
10.3.1	Fasilitasi tata kelola program SKALA					
*	10.3.1.1	Terlaksananya pertemuan Kelompok Kerja			Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
*	10.3.1.2	Terlaksananya pertemuan Komite Teknis			Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
*	10.3.1.3	Terlaksananya pertemuan Komite Pengarah			Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
*	10.3.1.4	Terlaksananya <i>Joint Supervision Mission</i> program SKALA			Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
10.3.2	Fasilitasi pengelolaan sekretariat program SKALA					
*	10.3.2.1	Terlaksananya review internal program SKALA			Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
	10.3.2.2	Penguatan kapasitas pengelolaan program SKALA lintas penggerak kemitraan			Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
10.4	Tata kelola program SKALA di Kementerian Pengampu					
10.4.1	Dukungan tata kelola program di Bappenas					

#	CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT			PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	10.4.1.1.	Perencanaan, Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan hibah program SKALA di Bappenas terlaksana	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat
	10.4.2	Dukungan tata kelola program di Kemendagri			
	*	10.4.2.1	Fasilitas teknis pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan hibah program SKALA di Kemendagri	Kemendagri - Pusat Fasilitas Kerja Sama	Pusat
	*	10.4.2.2	Fasilitas teknis penyusunan rencana strategis Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri - Setditjen Bina Pembangunan Daerah	Pusat
		10.4.2.3	Fasilitas teknis kegiatan berbagi pengalaman dan praktik cerdas kerja sama antara daerah dengan luar negeri	Kemendagri - Pusat Fasilitas Kerja Sama	Pusat
	*	10.4.2.4	Input teknis penyusunan pedoman pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Luar Negeri	Kemendagri - Pusat Fasilitas Kerja Sama	Pusat
	*	10.4.2.5	Fasilitas teknis peningkatan kapasitas daerah terkait kerja sama daerah, terutama Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL)	Kemendagri - Pusat Fasilitas Kerja Sama	Pusat
	*	10.4.2.6	Rekomendasi teknis terkait pengelolaan hutang daerah (berdasarkan hasil kajian terkait pengelolaan hutang daerah)	Kemendagri - Dit. Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah	Pusat
	10.4.3	Dukungan tata kelola program di Kemenkeu			
	*	10.4.3.1	Perencanaan, Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan hibah program SKALA di Kemenkeu terlaksana	Kemenkeu - Setditjen Perimbangan Keuangan	Pusat
	10.5.	Tata kelola program SKALA di Provinsi			
	10.5.1	Dukungan tata kelola program di Provinsi Aceh			

#	CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT			PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	10.5.1.1	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi Aceh	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Aceh;
	10.5.2	Dukungan tata kelola program di Provinsi NTB			
	*	10.5.2.1	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi NTB	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi NTB;
	10.5.3	Dukungan tata kelola program di Provinsi NTT			
	*	10.5.3.1	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi NTT	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi NTT;
	10.5.4	Dukungan tata kelola program di Provinsi Kalimantan Utara			
	*	10.5.4.1	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi Kalimantan Utara	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Utara;
	10.5.5	Dukungan tata kelola program di Provinsi Gorontalo			
	*	10.5.5.1	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi Gorontalo	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Gorontalo;
	10.5.6	Dukungan tata kelola program di Provinsi Maluku			
	*	10.5.6.1	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi Maluku	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Maluku;
	10.5.7	Dukungan tata kelola program di Provinsi Papua			
	*	10.5.7.1	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi Papua	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Papua;
	10.5.8	Dukungan tata kelola program di Provinsi Papua Barat			

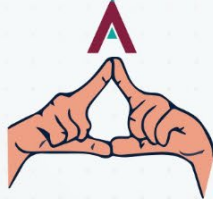
#	CAPAIAN ANTARA / AREA FOKUS / KEGIATAN / OUTPUT			PENGAMPU	LOKASI PELAKSANAAN
	*	10.5.8.1	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi Papua Barat	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Papua Barat;
	10.5.9	Dukungan tata kelola program di Provinsi Papua Selatan			
	*	10.5.9.1	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi Papua Selatan	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Papua Selatan;
	10.5.10	Dukungan tata kelola program di Provinsi Papua Barat Daya			
	*	10.5.10.1	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi Papua Barat Daya	Bappenas - Dit. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Papua Barat Daya;



S



K



A



L



A



www.skala.or.id